

# PETANI GARAM DESA BENTENG

Suatu Tinjauan Sejarah Tentang Petani Garam  
di Benteng Tahun 1950-1980



## SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Sejarah & Arkeologi  
Fakultas Sastra  
Universitas Hasanuddin

OLEH  
**AMIR**  
85 07 198

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. terima	4-11-1992
Asal dari	Fak. Sastra
Keperluan	2 (Dua) exp
Uraian	Hadiah
No. Inventaris	92 4 11 1412
No. Klas	

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG

1992

UNIVERSITAS HASANUDDIN

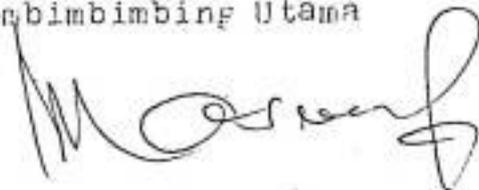
FAKULTAS SAstra

Halaman Pengesahan

Sesuai dengan surat tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor : 693/PT. 04.H5.FS /U / 1991 30 April 1991, dengan ini kami menerima dan menyetujui Skripsi ini.

Ujung Pandang, 14 - 8 -1992

Pembimbing Utama



(Prof. Dra. Marrang Paraman, M.S)

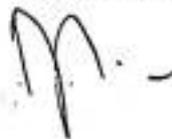
Pembantu Pembimbing



( Drs. Daud Limbugau, SU )

Disetujui untuk diteruskan  
kepada Panitia Ujian Skripsi  
Dekan,

ab. Ketua Jurusan Sastra Sejarah  
dan Arkeologi.



( Drs. Daud Limbugau, SU )

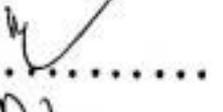
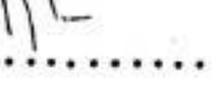
Nip. 130 190 505

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini Selasa , tanggal 1 sept. 1992  
Tim Penguji menerima baik Skripsi dengan Judul :  
Petani Garam Desa Benteng Suatu Tinjauan Sejarah Tentang  
Petani Garam di Benteng Tahun 1950-1980, dalam rangka me-  
penuhi salah satu syarat ujian akhir Sarjana Jurusan Seja-  
rah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Ujung Pandang, 1 September 1992

TIM PENGUJI

- |   |            |   |
|---|------------|---|
| 1. <u>Drs. Harun Kadir</u>              | Ketua      |  |
| 2. <u>Drs. A. Tadjuddin Biso Rum</u>    | Sekretaris |  |
| 3. <u>Dr. Baharuddin Batslipu</u>       | Anggota    |  |
| 4. <u>Dra. Ny. Ida S. Harun</u>         | Anggota    |  |
| 5. <u>Prof. Dra. Ny. Marrang P.M.S.</u> | Anggota    |  |
| 6. <u>Drs. Dawud Limbugau, S.H.</u>     | Anggota    |  |

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, oleh karena taufik dan hidayahNya lah semata sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari, bahwa untuk menyusun skripsi yang sempurna tidaklah mungkin bila dihubungkan dengan daya dan kemampuan ilmiah yang penulis miliki, oleh karena itu tidak sedikit kekeliruan dan kesalahan bahkan kekurangan-kekurangan dalam penulisan ini.

Namun demikian, bahwa dengan rampungnya penulisan ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan para pembimbing penulis yang dengan sabar dan penuh tanggungjawab memberikan petunjuk-petunjuk, sehingga sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, pertama-tama penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Prof. Dra. Ny. Marrang Paraman, MS dan Bapak Drs. Daud Limbugau, SU sebagai pembimbing utama dan pembantu pembimbing. Semoga amal bakti yang Bapak berikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Sehubungan dengan selesainya skripsi ini pula, penulis dengan rendah hati mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M. A. Rektor Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

2. Bapak Dr.Najamuddin MSc, Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
3. Bapak-Bapak Pembantu Dekan Fakultas Sastra UNHAS.
4. Bapak Drs.Daud Limbugau, SU dan Dra.Ny.Ida Harun Ketua dan Sekretaris Jurusan Sejarah dan Arkeologi UNHAS.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Sastra UNHAS.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Pegawai Fakultas Sastra UNHAS.
7. Bapak-Bapak para petani di Kelurahan Benteng sebagai informan yang telah memberikan informasi tentang penggraman.
8. Semua rekan-rekan yang penulis tidak sempat sebut satu persatu dalam penulisan ini.

Akhirnya kepada Ayahanda Almarhum dan Ibunda tercinta dengan penuh rasa tanggungjawab dan penuh rasa kasih sayang memberikan petunjuk dan dorongan kepada penulis hingga penyelesaian penulis, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sesuai dengan amal baktinya Insya Allah. Amin

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Penerimaan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Bab. I. Pendahuluan .....	1
1.1. Alasan Memilih Judul .....	1
1.2. Masalah dan Pembatasan Masalah .....	4
1.3. Metode .....	8
Bab. II. Identifikasi Daerah Penelitian .....	14
2.1. Sejarah Singkat Desa Benteng .....	14
2.2. Penduduk .....	18
2.3. Kehidupan Sosial Budaya .....	23
Bab. III. Masa 1950-1960 .....	32
3.1. Keadaan Petani Garam .....	32
3.2. Sistem Pembuatan Garam .....	38
3.3. Produktifitas .....	44
3.4. Dampak Sosial Ekonomi.....	49
Bab. IV. Masa 1961-1980 .....	55
4.1. Beberapa Perubahan Sistem .....	55
4.2. Produktivitas .....	61
4.3. Tingkat Kehidupan Petani .....	65
4.4. Dampak Sosial Ekonomi .....	67
Bab. V. Kesimpulan .....	71
Daftar Pustaka .....	75
Daftar Lampiran :	
Lampiran 1 : Jenis Alat Penggaraman .....	77
Lampiran 2 : Alat-alat Penggaraman .....	78
Lampiran 3 : Alat-alat Penggaraman .....	79
Lampiran 4 : Skema Penggaraman Type Benteng.	80
Peta Lokasi Penelitian .....	81

## BAB.I

### P E N D A H U L U A N

#### 1.1. Alasan Memilih Judul

Manusia sebagai sumber sejarah, pelaksana, sekaligus sebagai objek atau sasaran dari sejarah itu sendiri, menunjukkan perubahan-perubahan dalam kehidupannya bersamaan dengan dimensi waktu yang mengitari manusia itu sendiri. Kehidupan manusia yang menunjukkan perubahan-perubahan itu terlihat pada segala segi kehidupan, baik segi ekonomi, politik, sosial serta budaya.

Dalam hubungannya dengan usaha pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri (dalam hal ini kebutuhan fisik), di Indonesia misalnya, bahwa pada dasawarsa pertama pembangunannya dititikberatkan pada usaha peningkatan pertanian sebagai kerangka dasar untuk mengarah pada kehidupan bangsa yang dicita-citakan.

Sehingga pemerintah melaksanakan berbagai kebijaksanaan untuk pengembangan pertanian yang sasarannya tidak lain untuk peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Seperti halnya kebijaksanaan tentang pemilikan tanah rakyat untuk tempat berusaha dan mencari nafkah.

Di Desa Benteng Kabupaten Jeneponto, salah satu daerah pedesaan di Propinsi Sulawesi Selatan, yang pada masa lalu merupakan bagian dari kerajaan Gowa pada masanya, juga terlihat bahwa kehidupan masyarakatnya tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas seperti ekonomi, so-

sial budaya termasuk pertanian dan hasil pertaniannya. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Tantu, bahwa ; di Desa Benteng ditemukan ada tiga jenis aktivitas perekonomian masyarakatnya yakni : nelayan, petani ( empang, dan garam) serta pelayar atau pedagang<sup>1</sup>.

Dari aktivitas-aktivitas kehidupan itu telah menunjukkan perubahan-disegala segi terutama di bidang pertanian. Hal mana sejalan dengan perkembangan negara kita dari bentuk kerajaan ke bentuk yang lebih bersatu, yakni Negara republik Indonesia. Aktivitas dalam kaitannya dengan pertanian memperlihatkan kemajuan-kemajuan baik cara maupun bentuk dari cara pertanian itu sendiri yang tidak lain sasarannya untuk meningkatkan taraf hidupnya, meskipun para penggarap masih tetap miskin. Perubahan atau kemajuan-kemajuan itu antara lain penerapan atau sistim pertanian dari tradisional mengarah pada sistim pertanian yang lebih modern.

Hal yang mendasari penulis untuk mengangkat permukaan tentang petani garam di Desa Benteng, adalah bahwa sampai pada tahun 80-an tingkat kehidupan para petani garam masih berada di bawah kemiskinan (sesuai dengan hasil penelitian Hammado Tantu), dibanding dengan para pemilik dan para pedagang garam itu sendiri.

---

<sup>1</sup>) Baca Hammado Tantu. Pegaram dan Kehidupannya. Studi Kasus pada Masyarakat Benteng dan Bontorannu di Kabupaten Jeneponto. Dalam buku : Dimensi Sosial Kawasan Pantai. Oleh Mukhlis Paeni. Ujung Pandang : P3MP, 1988, hal. 279

Pengungkapan ini dimaksudkan untuk dapat melihat sejauhmana tingkat kehidupan para petani garam dalam perkembangannya sampai pada akhir tahun 80-an sekaligus pengungkapan tentang hal-hal yang menunjang serta menghambat perkembangan kehidupan itu. Dalam kaitannya dengan petani garam itu, bahwa pada masyarakat Benteng Kabupaten Jeneponto terlihat adanya hubungan kerja yang sangat mempengaruhi tingkat pendapatan sekaligus taraf hidup para petani garam yakni tesang<sup>2</sup>. Dalam hubungan ini penulis ingin melihat pelaksanaan tesang itu lewat kaca mata sejarah untuk melihat berbagai akibat yang mungkin muncul dalam hubungan antara petani garam dan para tu-appatesang (pemilik) tanah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa hubungan petani dalam bentuk tesang sangat mempengaruhi taraf hidup petani garam khususnya di Desa Benteng.

Disisi lain, bahwa dengan penulisan ini diharapkan dapat memahami latarbelakang pendidikan yang langsung mempengaruhi cara pengolahan garam, kehidupan pegaram serta keadaan sosial budaya masyarakatnya. Hal mana bahwa tingkat pendidikan dan keadaan sosial budaya yang dimiliki oleh para petani sangat menentukan tingkat atau cara pengolahannya yang pada gilirannya akan menentukan hasil yang lebih baik atau tidak.

---

<sup>2</sup>) Tesang, adalah suatu hubungan kerja antara dua orang petani, disatu sisi sebagai pemilik tanah (tu-appatesang) dan tu-attesang atau yang meminjam tanah milik orang lain, dengan sistim bagi hasil.

Dari hal-hal tersebut di atas, diharapkan penulisan ini nantinya dapat mengungkapkan dan mengangkat kepermukaan hal-hal yang sehubungan dengan: Petani Garam Desa Benteng-Suatu Tinjauan Sejarah Tentang Petani Garam di Benteng tahun 1950-1980.

### 1.2. Masalah dan Pembatasan Masalah

Kehidupan manusia mengalami perubahan-perubahan dalam setiap kurun waktu, sehingga karya budaya yang dihasilkan juga mengalami perubahan sebagai realisasi dari perkembangan kehidupan itu sendiri. Perubahan itu pula terjadi pada sistim pemenuhan kebutuhan seperti pada perubahan jaman batu menjadi berburu, dari jaman berburu menjadi beternak dan bertani berpindah-pindah sampai pada sistim pertanian yang menetap (pertanian modern).

Disamping itu perubahan sistim pertanian itu pula juga ditentukan oleh keadaan politik yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri seperti jaman penjajahan dan jaman kemerdekaan. Seperti diungkapkan oleh Sartono Kartodirdjo, yang mengatakan bahwa :

" Masyarakat petani sejak jaman kerajaan-kerajaan kuno sampai akhir jaman Kolonial tercakup dalam suasana pengaruh penguasa pusat yang berdasarkan struktur agraris masyarakatnya melakukan ekstraksi (penyadapan) hasil bumi serta tenaga kerja petani . Kartodirdjo, t.t. h. 1).

Sehingga dengan demikian maka perubahan kehidupan para

petani dengan sendirinya akan mengikuti atau ditentukan oleh keadaan yang mengitarinya, serta sistim pengolahannya sendiri.

Namun demikian, bahwa kondisi sosial, ekonomi masyarakat pedesaan menunjukkan perubahan yang sangat lamban. Hal ini mungkin diakibatkan oleh perkembangan pendidikan pada masyarakat pedesaan disamping pengaruh ikatan budaya yang sangat meningkat.

Sehingga sebagian para ahli berpendapat, bahwa masyarakat desa masih berada dibawah taraf kemiskinan (dijelaskan dimuka). Selain itu oleh Drs.H.Siagian, M.Pd mengatakan, bahwa :

"... segi kondisi sosial ekonomi pedesaan. Pada umumnya masyarakat pedesaan berada dalam belenggu rantai kemelaratan yang sifatnya saling menjalin atau sering disebut berada dalam jebakan penjarahan (devrivation) akibat saling pengaruh dari rantai kemelaratan itu membuat masyarakat terperangkap dalam kemiskinan terpadu (Siagian, 1989, h.10)

Keadaan seperti di atas juga terjadi pada masyarakat pedesaan yang mendiami sebagian dari Kabupaten Jeneponto yakni Desa Benteng, yang kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani garam.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi pada masyarakat pedesaan yang mayoritas bertani itu (termasuk petani garam) maka pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan para petani, khususnya petani garam di Desa

Benteng diharapkan akan sampai pada alternatif pemecahan untuk pengembangan selanjutnya. Sehingga kehidupan para petani garam dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik.

Perubahan kehidupan manusia sebagai realisasi dari usaha mereka akan membentuk ciri tersendiri, sehingga akan muncul juga perubahan tingkat kehidupan dan akan membentuk cara hidup yang baru. Berarti bahwa pada saat itu akan muncul wajah sejarah yang baru pada manusia yang ikut menyelarajah itu.

Usaha garam di Kabupaten Jeneponto, mulai dikenal masyarakat di Jeneponto yakni sejak pemerintahan Hindia Belanda. Hal itu dapat diketahui dari dasar penentuan pajak (sima) saat itu. Untuk menentukan pajak masyarakat pesisir digunakan empat dasar penggolongan, salah satu diantaranya yaitu " memiliki, menggarap sendiri, menyewa dan mempersewakan areal pembuatan garam atau attesang dan mempersewakan atau tu appatesang .

Gambaran tentang kurun waktu di atas, merupakan batasan waktu sekaligus merupakan batasan awal dari usaha pembuatan garam para petani garam di Jeneponto, walaupun penentuan waktunya kurang jelas. Dengan dasar dan titik tolak hal diatas, maka penulisan inipun diarahkan pada pencarian informasi tentang awal mula pembuatan garam serta perkembangannya sampai pada dekade 80-an.

Perkembangan penggaraman itu baik dari cara pengolahan, bentuk-bentuk pelaksanaannya (hubungan kerja petani) maupun sistim pemasaran hasil yang pada gilirannya akan menentukan taraf hidup para petani garam tersebut.

Bertolak dari pembatasan waktu dan pendapat yang ditujukan kepada masyarakat desa, khususnya para petani garam dalam hubungannya dengan sejarah perkembangan petani garam di Desa Benteng Kabupaten Jeneponto, maka oleh penulis melihat beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

- Hal-hal apakah yang mendukung dan mempengaruhi perkembangan petani garam di Desa Benteng.
- Sejauhmana tingkat kehidupan para petani garam di Desa Benteng .

Bertolak dari masalah-masalah yang penulis paparkan di atas, maka penulis membatasi pembahasan mengenai topik ini, yakni asal mula munculnya petani garam di Desa Benteng serta perkembangan penggaraman (petani garam) di Desa Benteng. Selanjutnya penulis juga berusaha untuk mengungkapkan tingkat kesejahteraan para petani garam khususnya di Desa Benteng dan hal-hal yang mempengaruhinya.

Mengenai batasan temporal dalam penulisan ini sesuai dengan judulnya maka, penulisan ini dititikberatkan mulai tahun 1950-1980. Walaupun bukan berarti bahwa akan terlepas dari keterkaitan waktu sebelumnya.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa antara tahun 1950-1980 itu keadaan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya sudah mulai ada kebebasan masyarakat untuk mengolah tanahnya sendiri, sehingga dengan demikian akan dapat dengan jelas dilihat perkembangan tentang kehidupan para petani garam tersebut.

### 1.3. Metode

Dalam hubungannya dengan penulisan masalah ini dalam bentuk karya ilmiah / skripsi, maka penulis menggunakan beberapa metode baik dalam pengumpulan datanya, pengolahan data serta metode penulisannya.

#### a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebagai langkah awal dalam penulisan biasa juga disebut heuristik, meliputi pengumpulan sumber-sumber, baik bersifat primer maupun bersifat sekunder. Dalam mencari dan mengumpulkan datanya dipergunakan beberapa sumber antara lain : buku-buku; arsip dan publikasi; artikel-artikel dan wawancara.

Buku-buku tersebut antara lain :

- Tesang studi tentang struktur hubungan kerja petani di Lakatong, ditulis oleh Mudiyon. Laporan penelitian pada PLPIIS Ujung Pandang ini, berisikan tentang pengolahan tanah, sistem pelepasan dan pemilikan tanah, pola konsumsi dan tingkat pendapatan, serta dinamika masyarakat dalam mencapai prestasi kerja di Desa Lakatong, Kab. Takalar. Yang paling penting bahwa didalamnya membicarakan tentang pola penggarapan serta hubungan kerja antara petani

garam di Desa Lakatong, proses kerja serta tingkat pendapatan para petani garam di Lakatong.

- Masyarakat Pantai, yang diedit oleh DR. Mukhlis Paeni. Isinya menyangkut hasil-hasil penelitian pada masyarakat pantai, antara lain membicarakan tentang kehidupan para nelayan, para pedagang serta hal-hal lain yang membicarakan tentang kelautan.

Dalam buku ini termasuk hasil penelitian tentang pagaram dan kehidupannya. Studi kasus pada masyarakat Besteng dan Bontorannu di Kabupaten Jeneponto, yang dilakukan oleh Hammado Tantu. Penelitian ini membicarakan tentang ekologi usaha garam, siklus waktu penggarapan, peralatan serta gambaran kehidupan para petani garam pada dua desa di Kabupaten Jeneponto.

Arsip dan publikasi resmi yang dimaksudkan adalah berupa laporan-laporan yang ada pada kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah desa, Kecamatan, atau Kabupaten yang sehubungan dengan penggarapan. Apakah arsip-arsip tersebut berupa hasil atau bentuk serta cara pemasarannya. Sedangkan artikel adalah berupa penulisan-penulisan ilmiah yang telah dipublikasikan pada media-media cetak yang ada hubungannya dengan petani (lebih khusus lagi mengenai petani garam).

Disamping sumber-sumber tertulis di atas, penulis juga mempergunakan metode pencarian data tersebut dengan jalan wawancara. Adapun metode wawancara ini penulis

penulis melakukannya dalam bentuk wawancara bebas dan pendekatan sosiologi dan psikologi. Disini penulis mengadakan wawancara terhadap sejumlah informan yang terkait di dalam usaha tani garam tersebut.

Golongan-golongan tersebut yakni para penggaap, (Pabce'lang), para pemilik lahan penggaraman, para pedagang dan pemerintah setempat. Hal ini dimaksudkan agar informasi mengenai kehidupan para petani garam dapat dilihat dari segala segi, sehingga gambaran tentang tingkat kehidupannya dapat diungkapkan dengan jelas.

#### b. Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam rangka mencari dan menemukan data tentang penggaraman tersebut, maka penulis mengadakan kritik terhadap data yang dapat dikumpulkan oleh penulis. Dalam hubungan ini penulis menggunakan metode kritik yakni dalam bentuk kredibilitas data. Maksudnya bahwa data yang dikumpulkan akan ditentukan oleh nilai data.

Pengolahan dan kritik data seperti tersebut di atas bertolak pada pendapat Gotschalk yang mengatakan, bahwa :

"Kredibel bukanlah bahwa unsur itu adalah apa yang sungguh-sungguh terjadi, melainkan bahwa unsur itu paling dekat dengan apa yang sungguh-sungguh terjadi, sejauh dapat kita ketahui berdasarkan suatu penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber terbaik yang ada ( Louis Gotschalk, 1983 : 95).

Dalam hubungannya dengan pengolahan data dalam penulisan

ini, maka penulis berusaha untuk memilih data yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Maksudnya bahwa data tersebut lebih dekat dan lebih sesuai dengan penulisan (objek penulisan). Hal ini dimaksudkan agar dalam pengungkapannya dalam bentuk penulisan nantinya tidak akan keluar dari permasalahan pokok. Sehingga apa yang diharapkan tentang penulisan ini dapat diungkapkan dengan baik dan jelas.

### c. Metode Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini, akan didasarkan pada urutan kronologis, maksudnya bahwa data yang terkumpul akan ditulis berdasarkan kurun waktu kejadian tersebut. Disamping itu bahwa penulisan ini didasarkan pada cara yang antara lain :

Cara Induktif, yakni suatu metode penulisan yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian diarahkan pada pendapat-pendapat yang bersifat umum.

Cara Deduktif, yakni suatu metode penulisan yang bertolak dari pendapat-pendapat atau konsep-konsep umum yang telah dikemukakan para ahli, yang diarahkan pada hal-hal yang bersifat khusus.

Dari kedua pendekatan penulisan di atas, penulis merangkumnya dalam satu bentuk penulisan yaitu Deskriptif Analitis. Maksudnya bahwa penulisan tentang masalah tersebut yakni dalam bentuk pemaparan yang diikuti oleh analisa kritis terhadap data tersebut. Hal

ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran dan alternatif pengembangan dari masalah yang ingin diungkapkan.

Adapun aspek-aspek yang akan diungkapkan dalam penulisan ini, yakni menyangkut masalah-masalah yang melatarbelakangi penulisan ini, serta permasalahan petani garam itu sendiri termasuk metode-metode yang berkaitan dengan penulisan atau pengungkapan petani garam di Benteng. Pembahasan ini dikemukakan pada bab pertama tulisan ini sebagai kerangka dasar penulisan ini.

Selanjutnya dalam tulisan ini juga dijelaskan mengenai identifikasi daerah, dalam hal ini sejarah singkat desa Benteng, sistem pemilikan tanah, penduduk, kehidupan sosial masyarakat termasuk dalam hal ini sistem pemilikan tanah oleh masyarakat di Desa Benteng termasuk juga didalamnya pembahasan tentang strata sosial masyarakat di Desa Benteng. Pembahasan ini berada pada bab kedua tulisan ini.

Pada bab ke tiga, yakni pembahasan mengenai keadaan petani garam, dalam hal ini mengenai sejarah petani garam di Desa Benteng, serta kondisi-kondisi masyarakat Benteng sejak dikenalnya penggaraman. Selain itu juga dijelaskan mengenai sistem atau proses pembuatan garam mulai dari awal hingga proses siap untuk dijual (khususnya oleh para petani), demikian juga halnya pembahasan tentang

produktivitas penggarapan di Benteng termasuk hasil-hasil yang dicapai oleh para petani garam di Desa Benteng Kabupaten Jeneponto.

Selanjutnya dikemukakan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi khususnya pada periode tahun 1961-1980 pembahasan ini baik yang menyangkut perubahan sistem pengolahan, hasil serta perubahan-perubahan sistem pemilikan tanah. Pada bab keempat ini pula dijelaskan mengenai tingkat pendapatan atau penghasilan para petani garam di Desa Benteng termasuk pengungkapan tentang beberapa petani yang dianggap berhasil. Dalam bab ini pula dijelaskan mengenai dampak-dampak yang terjadi dalam masyarakat Benteng khususnya bagi para petani, baik dampak (perubahan-perubahan) ke arah positif, maupun usaha-usaha untuk perbaikan sistem-sistem yang dianggap masih perlu pembenahan seperti sistem pemasaran dan lain-lain. Kemudian tulisan ini ditutup oleh sebuah hasil penulisan dalam bentuk kesimpulan, yang kemudian diikuti oleh saran-saran yang sehubungan dengan peningkatan produktivitas dan kehidupan petani garam di Desa Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto .

## B A B. II

### IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN

#### 2.1. Sejarah Singkat Desa Benteng

Pengenalan awal tentang Benteng yang ada sekarang belum ada penetapan waktu yang tepat, hanya disebutkan oleh masyarakat bahwa "Benteng sejak dahulu kala adalah merupakan perkampungan yang merupakan pusat kegiatan para raja-raja dan tempat pertemuannya<sup>1</sup>. Ini berarti bahwa sejak pengenalan kerajaan-kerajaan di daerah-daerah yang biasa dikenal dengan Turatea, daerah ini (Benteng) sudah mulai dikenal. Sedangkan Benteng itu sendiri berarti sebagai tempat pertahanan para raja sejak masuknya Belanda sampai pada masuknya Jepang.

Benteng sejak jaman kerajaan adalah merupakan salah satu daerah yang berada dibawah kekuasaan kerajaan Binamu (Penulisan Sejarah Jeneponto, 1979 : 5). Seperti diketahui, bahwa sejak abad ke XIII di daerah yang dikenal dengan Turatea ini telah berdiri beberapa kerajaan-kerajaan kecil antara lain kerajaan Binamu, kerajaan Bangkala, Tolo, Rumbia, Arungkeke dan kerajaan Taroang (Penulisan Sejarah Jeneponto, 1979 : 4).

Melihat status daerah Benteng yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Binamu sedangkan Binamu sendiri adalah

---

<sup>1</sup>Wawancara. Dg. Gassing. Tanggal 10 November 1991, di Benteng Kab. Jeneponto.



merupakan daerah bawahan kerajaan Gowa sebagai hasil ekspansinya ke daerah-daerah sekitarnya sejak masa pemerintahan " Tumapa'risi Kallonna".

Bertolak dari keadaan seperti di atas, berarti bahwa sejak penguasaan Gowa terhadap kerajaan Binamu, termasuk Benteng, status daerah tersebut berubah menjadi suatu daerah yang berada di bawah naungan kerajaan Gowa. Namun bukan berarti bahwa pada daerah tersebut terjadi perubahan letak atau perluasan. Ini berarti bahwa sejak saat itu perubahan status yang sekarang menjadi sebuah Kelurahan bersamaan dengan perubahan-perubahan status daerah-daerah di Kerajaan Gowa.

Perubahan status kerajaan Gowa seperti terlihat pada saat kekalahan kerajaan Gowa oleh VOC, yaitu pada sekitar tahun 1651 ( Sagimun MD, 1985 : 80 ). Berarti bersamaan dengan itu Benteng berada dibawah penguasaan Belanda sebagai penjajah. Masuknya penjajahan Belanda di kerajaan Gowa secara umum, termasuk kerajaan Binamu dan Benteng sebagai salah satu daerahnya, maka status daerah inipun berubah bersamaan dengan perubahan-perubahan status daerah-daerah lainnya di Kerajaan Gowa dan bawahannya. Sehingga pada saat itu Binamu yang membawahi Benteng berubah menjadi " Onderafdeling Binamu" ( Patunrūk, 1983 : 100-101).

Selanjutnya perubahan status daerah ini, berjalan bersamaan dengan perubahan sistim politik di Sulawesi

Selatan yakni pada masa pemerintahan NIT ( 1946-1950 ) kerajaan Gowa dan daerah-daerah lainnya, dirubah menjadi anggota dari pemerintahan gabungan Selebes Selatan, yang telah dibentuk oleh pemerintah Negara Indonesia Timur. Namun karena pergolakan politik yang semakin tidak menentu di Sulawesi Selatan dan Indonesia timur secara umum, maka oleh Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai ketua hadat tinggi menyatakan keluar dari ketatanegaraan NIT pada tanggal 26 April 1950, dan selanjutnya menggabung langsung kepada Republik Indonesia di Jogjakarta. Tahun 1952 pemerintahan Gabungan Selebes Selatan dibubarkan dengan peraturan pemerintah pusat tanggal 12 Agustus 1952 No.34 sekaligus merubah daerah-daerah kerajaan Gowa menjadi 7 buah daerah Kabupaten yang otonom berdasarkan Undang-Undang NIT 1950 No.44, tetapi yang stingkat dengan Kabupaten Swatantra Tingkat II, menurut Undang-Undang 1948 no.22 Ciptaan Republik Jogjakarta. Ketujuh buah kabupaten itu adalah termasuk kabupaten Makassar, yang meliputi onderafdeling-nderafdeling lama, yaitu : Gowa, Takalar, Jenenponto, Maros dan Pangkajene ( Patunruk, 1983 : 129).

Melihat keadaan seperti tersebut di atas, maka mulai pada saat itu Jenenponto berdiri sebagai suatu daerah otonom. Ini berarti dengan sendirinya daerah-daerah yang berada dibawah naungannya turut berubah status, termasuk dalam hal ini Benteng.

Sejak tahun 1961 daerah Benteng berada di bawah naungan distrik Bangkala, yang terdiri dari dua wilayah yakni Wilayah Allu dan Wilayah Pallengu. Selanjutnya pada tahun 1961 berdasarkan dengan Undang-Undang No.18 tahun 1961 tentang pokok-pokok pemerintahan desa praja, maka pemerintahan wilayah gelaran Allu dan pemerintahan Pallengu disatukan dan diberi nama Bori Benteng. Kemudian dari pemerintahan Bori Benteng dimekarkan menjadi 5 (lima) pemerintahan wilayah gelaran antara lain :

- a. Gelaran Allu 3 kali gelaran Allu
  - b. Gelaran Sawitto
  - c. Gelaran Pallengu 3 kali gelaran Pallengu
  - d. Gelaran Ciniayo
  - e. Gelaran Ujung Bori 3 kali gelaran wilayah Karaeng Pallengu
- ( Penulisan Sejarah Jeneponto, 1979 : 8).

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.15.9/XII/1965, maka istilah Bori Benteng dirubah menjadi desa Benteng. Keadaan seperti ini berlangsung sampai tahun 1980.

Perubahan nama desa Benteng menjadi Kelurahan Benteng sejak tahun 1981, tepatnya tanggal 1 Januari 1981, berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1979, tentang pokok-pokok pemerintahan desa. Ini berarti bahwa sejak saat itu Benteng berstatus sebagai sebuah Kelurahan pada 12 desa definitif yang ada di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

## 2.2. Penduduk

Permasalahan utama dalam melihat perubahan-perubahan penduduk suatu masyarakat desa adalah menyangkut sumber, karena pada umumnya desa-desa khususnya di Sulawesi Selatan belum ada pendataan yang terinci secara kronologis. Demikian juga halnya dengan keadaan penduduk desa benteng, yang dulunya merupakan daerah kekuasaan kerajaan Binamu. Dalam penulisan Sejarah Jeneponto hanya disebutkan secara umum tentang jumlah penduduk Kecamatan Bangkala yang pada saat itu masih berstatus Gemenschap. Jumlah penduduk hasil cacah jiwa tahun 1944, tersebut adalah sebagai berikut :

Binamu	:	112.456 jiwa
Bangkala	:	23.616 jiwa
Arungkeke	:	6.173 jiwa
Tarawang	:	5.471 jiwa

Selanjutnya cacah jiwa yang dilakukan pada tahun 1974, yang terdapat dalam Penulisan Sejarah Jeneponto, setelah status Jeneponto menjadi sebuah Kabupaten berjumlah sebanyak 213.329 jiwa yang tersebar di lima Kecamatan masing-masing sebagai berikut :

Kecamatan Binamu	:	47.438 jiwa
Kecamatan Bangkala	:	42.173 jiwa
Kecamatan Tamalate	:	48.126 jiwa
Kecamatan Batang	:	38.323 jiwa
Kecamatan Kelara	:	37.224 jiwa.

Melihat komposisi penduduk Kecamatan Bangkala pada masa berstatus Gemenschap sebanyak kurang lebih 23.616 jiwa yang kemudian pada selang waktu kurang lebih tiga puluh enam tahun yakni sampai pada tahun 1980, penduduk yang mendiami kecamatan Bangkala sudah mencapai 42.173 jiwa. Ini berarti bahwa ada peningkatan pertumbuhan penduduk yang cukup besar.

Demikian juga halnya di daerah-daerah lainnya yang juga mengalami perubahan atau peningkatan jumlah penduduk. Bahkan terlihat, bahwa penambahan penduduk tersebut bersamaan dengan penambahan atau perubahan-perubahan daerah secara administrasi. Maksudnya bahwa perubahan itu sejalan perubahan sistim pemerintahan misalnya dari status Gemenschap berubah menjadi Kabupaten dengan jumlah kecamatan sebanyak lima buah. Khusus untuk kecamatan Bangkala terdiri dari 6 buah desa dengan jumlah penduduk 48.307 jiwa pada tahun 1980.

Melihat perubahan-perubahan penduduk di Benteng yang dapat dilihat dari tahun 1944 sampai pada tahun 1980 menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang cukup besar. Tahun 1944 misalnya, pada saat Benteng masih berada di bawah naungan Binamu dengan jumlah penduduk sudah mencapai kurang lebih 91.126 jiwa secara keseluruhan, berarti khusus untuk Benteng memang sudah cukup besar.

Selanjutnya pada masa Benteng sudah berada pada Kecamatan Binamu, penambahan penduduknya semakin me-

ningkat yakni pada tahun 1974, dengan jumlah jiwa sebanyak 47.438 jiwa untuk satu kecamatan. Demikian juga perubahan penduduk khusus di Desa Benteng, yakni kurang lebih 4.478 jiwa sampai pada tahun 1980 seperti yang tercatat pada data penduduk Desa Benteng.

Penduduk Kelurahan Benteng yang berada pada Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto ini, tergolong suku Makassar, yang biasa dikenal dengan nama "Turatea". Penduduk Kelurahan Benteng ini dalam berhubungan dengan sesamanya sehari-hari memakai bahasa yang disebut Makassar dengan dialek "Konjo".

Sejak dahulu kala penduduk di daerah ini telah mengenal sistim pertanian, terutama penanaman padi di sawah. Oleh karena itu pertanian merupakan mata pencaharian pokok masyarakatnya. Disamping itu banyak juga melakukan aktivitas kehidupan di laut, baik sebagai nelayan maupun sebagai pelaut yang menggunakan perahu-perahu tradisional. Dalam hal penyelenggaraan pertanian masyarakatnya kebanyakan bekerja hanya sebagai penggarap utamanya pada jaman kerajaan. Hal ini diakibatkan oleh status tanah pada saat itu, yang kebanyakan dimiliki oleh para raja/bangsawan.

Perubahan status tanah tersebut terlihat sejak sistim kerajaan tersebut mulai menurun (maksudnya mulai munculnya persamaan hak). Sehingga dalam keadaan seperti ini masyarakat umum sudah mulai memiliki tanah secara

perorangan, yang berarti pula pengolahan tanahnya sudah mulai menggarap tanah sendiri. Bahkan pada abad ke XX ini tanah sudah mulai diperjual belikan, berarti pemilikan tanah itu bukan saja pada golongan bangsawan, akan tetapi juga sudah dimiliki oleh masyarakat umum.

Dengan latarbelakang kondisi alam dan kemampuan penduduknya, sehingga masyarakat Benteng kebanyakan bekerja sebagai petani, nelayan dan sebahagian yang bekerja sebagai pedagang. Selain bekerja sebagai petani, nelayan atau pedagang seperti disebutkan di atas, masih ada sebahagian dari penduduk yang bekerja sebagai pegawai, utamanya sejak jaman kemerdekaan sampai sekarang.

Sebelum perang dunia ke II di Jeneponto secara umum dan Benteng secara khusus terkenal sebagai daerah dimana sering terjadi peristiwa-peristiwa kriminal seperti pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Hal ini terutama disebabkan oleh kondisi alam, tingkat pengetahuan dan bahkan juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan/pertanian yang belum begitu baik. Misalnya pada saat itu masyarakat hanya bisa memperoleh hasil pertanian/persawahannya sebanyak satu kali setahun. Hal ini sebagai akibat dari kondisi tanah persawahan tersebut dengan status tadah hujan, maksudnya tergantung pada curah hujan yang turun didaerah tersebut.

Selanjutnya pada akhir-akhir tahun 1980-an di Jeneponto termasuk Kelurahan Benteng diadakan perbaikan

sistim pertanian, utamanya sarana pendukung pertanian atau persawahan yakni dibangunnya bendungan di beberapa daerah termasuk di Kelurahan Benteng.

Masyarakat " Turatea " termasuk dalam hal ini masyarakat Benteng yang termasuk masyarakat yang tergolong suku Makassar pada umumnya menganut agama Islam. Pengenalan agama Islam sebagai agama pilihan masyarakatnya, bersamaan dengan penerimaan agama Islam itu di Kerajaan Gowa dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Hal mana diketahui, bahwa penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan pada umumnya diperankan oleh Gowa sebagai penganut awal agama wahyu tersebut. Pengenalan agama Islam oleh masyarakat Benteng sebagai salah satu daerah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Gowa pada masa masuknya agama Islam, juga dimulai pada saat penerimaan Islam itu sebagai agama resmi kerajaan di Kerajaan Gowa. Seperti diketahui, bahwa agama Islam untuk pertama kalinya disebarkan di Gowa dan Sulawesi Selatan pada umumnya yakni sejak tahun 1605 atau sekitar abad ke XVII. Seperti dijelaskan dalam sejarah Jeneponto, bahwa dalam tahun 1607 seluruh rakyat kerajaan Gowa telah memeluk agama Islam yang selanjutnya menyebarkannya ke daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan atau menyampaikannya kepada kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Bone, Soppeng, Wajo dan kerajaan-kerajaan lainnya. Perkembangan agama Islam di Benteng sampai sekarang semakin meningkat.

### 2.3. Kehidupan Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Benteng, pada dasarnya tidak berbeda dengan kehidupan sosial budaya masyarakat di Jeneponto secara umum atau bahkan tidak berbeda dengan kehidupan sosial budaya masyarakat yang tergolong suku Makassar atau masyarakat " Turatea " secara umum.

Sehubungan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat di Benteng yang sekarang menjadi Kelurahan Benteng, maka penulis akan melihat pada beberapa segi sosial budaya. Aspek-aspek sosial budaya masyarakat yang akan penulis kemukakan sehubungan dengan penulisan pegaram di Benteng ini, antara lain menyangkut adat istiadat masyarakat Benteng termasuk hubungan antara seorang dengan orang lain dalam kaitannya dengan pemilikan tanah, agama dan keyakinan masyarakat, strata sosial masyarakatnya serta tingkat pendidikan masyarakat Benteng.

#### a. Adat istiadat dan sistim pemilikan tanah

Hukum adat adalah suatu aturan adat kebiasaan yang merupakan norma tak tertulis dan selalu ditaati oleh anggota masyarakat. Jika terjadi pelanggaran norma adat istiadat, maka yang melanggar akan dikenakan sangsi dan bagaimana bentuk sangsi yang dikenakan, tergantung pada bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan, minimal suatu sangsi dapat berbentuk celaan atau cemoohan masyarakat sekelilingnya.

Adapun adat atau kebiasaan-kebiasaan yang akan dikemukakan oleh penulis adalah menyangkut adat kematian, pusaka mempusakai serta adat perkawinan masyarakatnya.

#### 1. Adat kematian

Pelaksanaan atau penyelenggaraan jenazah di Jenepon-  
to secara umum dan Benteng khususnya sejak dahulu (Jaman  
kerajaan), telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-  
perubahan tersebut misalnya, pada masa kerajaan penyeleng-  
garan jenazah dibeda-bedakan menurut strata sosial orang  
yang meninggal. Jika yang wafat itu adalah raja atau ke-  
turunan bangsawan, maka ia (si mayat), lebih banyak men-  
dapatkan perlakuan istimewa. Seperti halnya usungan mayat  
harus terbuat dari batang pinang, harus dipasang beberapa  
kaki payung dipancang dalam usungan dan beberapa orang  
(yang hidup) ikut serta diusung bersama mayat. Adat se-  
perti ini disebut adat Karaeng, dan tidak berlaku bagi  
masyarakat awam<sup>2</sup>.

Pelaksanaan adat semacam ini sampai sekarang juga  
mengalami perubahan, utamanya menyangkut pelaksanaannya  
serta status sosial si mayat. Misalnya bahwa saat sekarang  
ini pembedaan golongan masyarakat sudah mulai berkurang.  
Menurut pengamatan penulis hal ini disebabkan oleh peru-  
bahan sistim sosial yang mengarah pada persamaan hak yang  
hanya dibedakan oleh tingkat pemahaman keagamaan, pendi-  
dikan dan dan lain-lain ukuran dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup>) Wawancara. Dg. Gassing. Tanggal 10 November  
1991, di Benteng Kabupaten Jenepon-  
to.

## 2. Pusaka mempusakai

Suatu kebiasaan dalam masyarakat Jeneponto, termasuk di Benteng adalah pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang/ahli waris yang masih hidup. Pewarisan ini utamanya kepada anak-anaknya sebagai ahli waris yang pertama dan utama. Pelaksanaan pengalihan harta peninggalan seorang yang telah meninggal merupakan suatu ketentuan yang bertolak pada ajaran Islam, namun dalam pelaksanaannya kebanyakan dipengaruhi atau didasarkan pada ketentuan adat yang berlaku.

Menurut adat, harta tersebut dibagi oleh para ahli warisnya, tetapi menurut adat harta itu belum dapat dibagi sesegera mungkin setelah wafatnya pewaris. Hal ini diharuskan demikian, karena membagi harta peninggalan sesegera mungkin pada saat selesainya penguburan si wafat ( yang meninggalkan harta), adalah dianggap tabu, yang pantangan untuk dilakukan karena diartikan seolah-olah membongkar mayit dari kuburnya. Biasanya pembagian harta peninggalan dapat dilaksanakan, setelah memakan waktu yang cukup lama atau minimal masa berkabung telah selesai<sup>3</sup>.

## 3. Adat perkawinan

Adat perkawinan dalam masyarakat di Jeneponto, termasuk masyarakat di Benteng, sejak dahulu ( masa kerajaan) telah mengalami perubahan-perubahan sistim dan ketentuan

---

<sup>3</sup>) Wawancara. Dg. Gassing. Tanggal 10 November 1991, di Benteng Kabupaten Jeneponto.

perkawinan perkawinannya. Misalnya pada masa kerajaan maka seorang yang berasal dari golongan bangsawan/raja tidak bisa kawin dengan orang yang berasal dari keturunan yang bukan bangsawan, demikian pula sebaliknya. Namun keadaan seperti ini sampai sekarang juga mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan berkurangnya nilai perbedaan golongan dalam masyarakat yang didasarkan pada golongan darah seseorang.

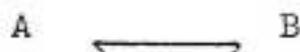
Setelah penulis menguraikan secara singkat tentang beberapa bentuk adat dalam masyarakat Benteng seperti di atas, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang sistim pemilikan tanah masyarakat Benteng. Hal ini diungkapkan sebagai kerangka acuan untuk melihat tingkat pendapatan para petani garam yang akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

Sistim pemilikan tanah yang dimaksudkan oleh penulis adalah menyangkut pemilikan tanah penggaraman. Hal mana bahwa dalam masyarakat Benteng dikenal dua bentuk pemilikan tanah penggaraman. Kedua bentuk pemilikan tanah tersebut utamanya menyangkut pengolahan tanah penggaraman oleh masyarakatnya. Dalam masyarakat Benteng dikenal istilah " Tu attesang" dan " Tu appatesang" ( Mudiono, 1978 hal.53). Tu attesang adalah orang yang mengolah tanah termasuk tanah penggaraman yang bukan miliknya sendiri. Sehingga dalam pengolahan tersebut diadakan perjanjian bagi hasil bagi pemilik tanah atau tu appatesang.

Sedangkan Tu appatesang adalah seseorang yang memiliki tanah atau tanah penggaraman, akan tetapi tidak sempat atau tidak mampu menggarapnya sendiri, sehingga diberikan kepada orang lain untuk diolahnya. Seperti disebutkan di atas, bahwa sistim seperti ini dilakukan dengan jalan bagi hasil.

Seperti disebutkan oleh Mudiono ( PLPIIS Ujung Pandang, 1978 : 53) dalam laporan penelitiannya yang berjudul Tesang, Studi Tentang Struktur Hubungan Kerja Petani di Lakatong, mengemukakan tiga model hubungan kerja sama antara para pemilik tanah dan pengolah/tu attesang, yang menurut pengamatan penulis juga terjadi dan sama yang dilakukan oleh masyarakat Benteng, sebagai berikut :

Model pertama, hubungan antara seorang tu appatesang dengan seorang patesang.



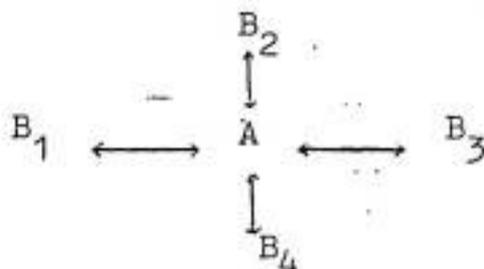
Keterangan :

A : Tu-Appatesang

B : Patesang

— : Garis hubungan

Model kedua, adalah hubungan kerja antara seorang Tu-Appatesang dengan beberapa orang Patesang.



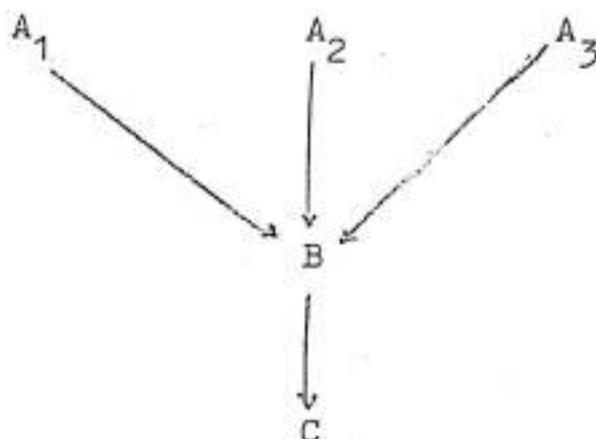
Keterangan :

A : Tu-Appatesang

B : Para Patesang

— : Garis hubungan

Model ketiga, adalah hubungan antara beberapa orang pemilik tanah penggarapan dengan seorang pekerja atau patesang.



Keterangan :

- $A_{1,2,3}$  : Tu-Appatesang  
 B : Patesang  
 C : Sawi/pekerja  
 ——— : Garis hubungan  
 - - - - : Garis hubungan upah

(Ketiga model hubungan kerja tersebut diatas, dikutip dari penulisan Mudiyono, 1978 : 83).

Sistim pemilikan tanah dan hubungan kerja semacam ini semakin berkembang pada saat sekarang ini, sebagai akibat dari perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Sistim pemilikan tanah seperti ini, seperti disebutkan dimuka, bahwa sebelumnya (khususnya pada masa penjajahan dan masa kerajaan), belum terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi pemilikan tanah pada saat itu masih berada pada satu tangan (penguasa).

#### b. Agama dan Keyakinan Masyarakat Benteng

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa masyarakat Benteng mayoritas menganut agama Islam. Namun demikian, sebelum kedatangan Islam sebagai agama resmi ( agama resmi kerajaan Gowa ), pada masyarakat Benteng dikenal suatu bentuk keyakinan, yang disebut kepercayaan kepada Dewata Sewae ( Dewa yang tunggal ), disebut pula Patotoe atau penentu nasib dan sebagainya ( M. Idrus Nurdin, 1978 : 28 ). Kepercayaan seperti ini menurut informasi yang penulis peroleh juga terjadi pada masyarakat Benteng dan bahkan sampai sekarang masih ada sebahagian dari penduduk masih melaksanakan kepercayaan-kepercayaan tersebut. Hal ini terlihat pada sebagian anggota masyarakatnya yang masih datang pada tempat-tempat tertentu, karena dianggap mempunyai kekuatan atau penjaga.

#### c. Strata Sosial Masyarakat Benteng

Lahirnya perbedaan golongan dalam masyarakat pada dasarnya diawali oleh adanya naluri manusia untuk saling menguasai. Karena dengan demikian akan muncul perbedaan golongan antara pemimpin dan yang dipimpin. Pembagian golongan dalam masyarakat akan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, bahkan akan mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam kancah politik.

Demikian juga halnya dalam masyarakat Benteng, yang merupakan bahagian dari kerajaan Gowa, bahwa perbedaan golongan itu diawali oleh adanya penguasaan yang satu

dengan yang lainnya. Selanjutnya bahwa secara umum di Sulawesi Selatan pada masa kerajaan, perbedaan golongan itu semakin jelas dengan adanya konsep To-Manurung. Di Gowa misalnya hal mana bahwa dalam masyarakatnya perbedaan golongan itu disebut "Wari" (pembagian dalam bentuk kasta-kasta) yang secara garis besarnya terbagi atas tiga golongan besar (Harun Kadir, et.al. 1978 : 36), yang menurut penulis hal ini juga terjadi pada masyarakat Benteng.

Pembagian golongan dalam masyarakat tersebut yakni

1. Anak Karaeng
2. Tomaradeka
3. Ata

ad.1. Anak Karaeng, golongan anak Karaeng atau anak Raja ini dapat dibagi lagi dalam empat golongan yaitu :

- a. Ana Ti'no, yakni golongan yang secara murni berdarah/keturunan langsung To-Manurung.
- b. Ana Sipuwe, berdarah campuran antara darah Ana Ti'no dengan ana Tubaji.
- c. Ana Cera, darah campuran antara ( Ayah ) ana Ti'no dengan ( Ibu ) dari seorang ata.
- d. Ana Karaeng Sela, berdarah ( Ayah ) ana Sipuwe dan ibu anak cerak, tumaradeka atau ata.

ad.2. Tumaradeka, lapisan masyarakat yang tergolong dalam Tumaradeka terbagi atas dua bahagian :

1. Tubaji dan 2. Tusamara.

Kedua golongan tersebut di atas termasuk golongan orang banyak/kebanyakan, walaupun Tubaji masih ada hubungan dengan ana Karaeng tapi sudah cukup jauh.

ad.3. Ata atau golongan budak.

Perbedaan antara satu golongan dengan golongan lainnya seperti tersebut di atas tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Perbedaan hak dan pengangkatan seorang pemimpin status sosial tersebut sangat menentukan.

## BAB. III

MASA 1950- 1960

### 3.1. Keadaan Petani Garam

Kondisi masyarakat pada suatu daerah, dengan sendirinya dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial budaya serta kondisi alam daerah itu sendiri. Apalagi kalau berbicara tentang kondisi masyarakat pada kurun waktu tertentu. Demikian juga halnya dengan keadaan masyarakat Benteng pada kurun waktu 1950 sampai dengan tahun 1960, khususnya para petani garam, maka kondisi politik, sosial budaya dan kondisi alamnya sangat menentukan. Bahkan kondisi politik tersebut bukan saja pada kondisi politik yang berjalan, akan tetapi dipengaruhi oleh sistim politik yang berlaku sebelumnya sebagai latarbelakangnya.

Sehubungan dengan keadaan petani garam di Benteng pada kurun waktu 195-1960, maka penulis akan melihat kondisi politik masyarakat yang mengitari pada saat itu dan sedikit mengenai sistim politik sebelumnya sebagai latarbelakngnya.

Untuk melihat situasi politik sebelum tahun 1950, maka penulis melihat pada awal perubahan sistim negara menjadi negara Republik Indonesia ( Negara Proklamasi 17 Agustus 1945). Seperti diketahui, bahwa sejak tahun 1945 (jaman kemerdekaan), masyarakat Indonesia secara umum dan Sulawesi Selatan khususnya termasuk Benteng,

belum merasakan sepenuhnya arti dan makna kemerdekaan dalam hal ini menyangkut kebebasan pemerintah dan penduduknya untuk membangun daerahnya masing-masing.

Keterbatasan dan kurangnya kebebasan seperti tersebut di atas sebagai akibat dari masuknya kembali para penjajah ( NICA ) sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 ( H.M. Sanusi Dg, Matata, 1967 : 5 ).

Penguasaan Belanda dalam bentuk usaha untuk menjajah kembali bangsa kita termasuk Benteng, dengan sendirinya akan mempengaruhi tingkat ekonomi, struktur sosial masyarakat bahkan mampu merubah sistim budaya dalam masyarakat khususnya bagi masyarakat si terjajah.

Pengaruh terhadap tingkat ekonomi misalnya, bahwa dengan adanya penguasaan kembali Belanda ( NICA ), dengan sendirinya kebebasan para anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupannya sangat sulit. Misalnya para petani garam akan sulit mengolah lahan pertaniannya dengan bebas atau bahkan tidak dapat mengolah penggarannya dengan baik. Berkaitan dengan itu maka dengan sendirinya pendapatan masyarakat khususnya para petani garam berada di bawah garis kemiskinan. Keadaan seperti ini mempengaruhi perkembangan petani garam di Desa Benteng, baik menyangkut sistem pengolahan penggarannya, maupun sistim pemasaran hasil-hasil penggarannya. Kesulitan ini utamanya dilihat dari segi pemasaran hasil, karena kondisi masyarakat yang tidak begitu bebas keluar kota.

Situasi politik seperti tersebut berlangsung hingga tahun 1951 sampai tahun 1960. Dengan demikian keadaan penduduk Benteng khususnya para petani garam belum menunjukkan perkembangannya dengan baik, baik itu sistim pengelolaannya maupun hasil-hasil yang diperoleh.

Selanjutnya pada tahun 1951 hingga tahun 1960 secara umum di Sulawesi Selatan terjadi lagi perubahan sistim politik, yaitu dengan adanya DI/TII oleh Kahar Muzakkar yang juga sangat mempengaruhi kebebasan para penduduk untuk mengolah tanah pertaniannya.

Untuk melihat bagaimana sehingga kehadiran DI/TII mempengaruhi kebebasan anggota masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur umumnya, penulis akan mengemukakan latarbelakang terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar tersebut. Seperti dikemukakan oleh Van Dijk, bahwa :

Ketegangan yang terjadi pada 1 Juli 1950 antara Kawilarang selaku Panglima Wilayah Indonesia Timur dengan Kahar Muzakkar selaku pimpinan Gerilyawan Sulawesi Selatan yang ditolak usulnya agar gerilyawan diterima menjadi TNI seluruhnya dan membentuk Brigade Hasanuddin, menandai awal gerakan Kahar Muzakkar dalam pemberontakan. Penolakan ini membuatnya merasa terhina dan melepas semua rencana yang dipakainya didepan Panglima untuk melanjutkan masuk hutan, memberontak ( Van Dijk 1983 : 157 yang dikutip oleh pada M.A.Tihami, 1984 : 54).

Melihat penjelasan di atas, maka terlihat bahwa terdapat dua orang yang saling bertolak pendapat yang masing-masing mempunyai kekuatan. Sehingga dengan sendirinya terjadi

pertentangan yang akan mempengaruhi ketentraman masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Makassar sebagai pusat kekuatan Kawilarang sebagai Panglima Wilayah Indonesia Timur akan mempengaruhi masyarakat yang ada disekitarnya termasuk dalam hal ini Benteng. Keadaan ini dimungkinkan karena usaha TNI dibawah pimpinan Kawilarang untuk menguasai gerilyawan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar yang tidak tertutup kemungkinan daerah Benteng sebagai tempat persinggahannya. Apalagi pada saat seperti ini masyarakat dihantui oleh perasaan-perasaan takut karena adanya dua bentuk kekuatan tersebut yang saling curiga mencurigai. Kondisi politik seperti ini dengan sendirinya mempengaruhi aktivitas anggota masyarakat termasuk dalam hal pengolahan lahan pertaniannya.

Berkaitan dengan kondisi politik pada penjelasan di atas, berarti kondisi ekonomi masyarakat juga akan semakin merosot. Untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat Benteng khususnya pada masa 1950 sampai dengan tahun 1960 atau masa pendudukan DI/TII di Sulawesi Selatan, penulis akan mengutip beberapa hasil wawancara dengan para informan dibawah ini.

Secara umum kondisi ekonomi masyarakat Benteng pada kurun waktu 1950-1960 dapat tergambar dari pengungkapan sebagai berikut :

- Jumlah areal penggarapan pada tahun 1950 di Benteng yang produktif debanyak kurang lebih 123 hektar.

Pada tahun 1960 luas areal penggaraman tersebut menjadi kurang lebih 163 hektar.

- Jumlah petani garam pada tahun 1950 sebanyak 53 orang dan pada tahun 1960 sebanyak 102 orang petani.
- Jumlah anggota keluarga para petani garam pada tahun 1950 adalah sebanyak 510 orang dan pada tahun 1960 sebanyak 600 orang/jiwa.
- Jumlah kendaraan beroda dua dan empat di Benteng pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1960 adalah sebanyak 21 buah.
- Jumlah sekolah di Benteng pada tahun 1950-1960 adalah sebanyak dua buah Sekolah Dasar<sup>1</sup>.

Sedangkan data tentang hasil garam yang diperoleh para petani garam pada kurun waktu tahun 1950-1960, seperti diungkapkan oleh salah seorang karyawan Kantor perindustrian Kab. Jeneponto bahwa pada saat itu produksi garam khususnya di Benteng hanya mampu mencapai 200 ton pertahunnya. Hasil produksi ini tidak mengalami perubahan yang berarti sampai pada tahun 1960<sup>2</sup>.

Melihat sarana-sarana penunjang perekonomian masyarakat Benteng seperti tersebut di atas, maka kelihatannya pendapatan masyarakatnya masih sangat kecil. Hal ini terjadi misalnya pada para petani dengan anggota keluarga yang cukup besar dengan tanah olahan yang relatif rendah.

---

<sup>1</sup>) Diambil pada kantor Perindustrian Kab. Jeneponto, kemudian penulis bandingkan dengan hasil wawancara Jaloha.

<sup>2</sup>) Wawancara. , karyawan Kantor Perindustrian Kab. Jeneponto, di Benteng tanggal 11 Nov. 1991.

Melihat tingkat ekonomi masyarakat Benteng pada kurun waktu tahun 1950 sampai dengan tahun 1960 di atas, pada dasarnya bukan saja dipengaruhi oleh sistim politik yang berjalan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat Benteng pada kurun waktu tersebut, penulis melihat pada beberapa segi antara lain :

sistim politik itu sendiri, dan yang tak kalah pentingnya ialah sistim pengolahan penggaraman termasuk sarana dan prasarana penunjang seperti sarana jalan, kendaraan serta pemasaran.

Melihat keterkaitan antara beberapa aspek sebagai pendukung lancarnya perekonomian masyarakat Benteng seperti disebutkan di muka, seperti sarana angkutan yang sangat kurang, berarti kelancaran pemasaran hasil produksi juga akan semakin sulit. Apalagi kalau pemasaran tersebut dihubungkan dengan keadaan politik dimana anggota masyarakat tidak bebas keluar masuk kota.

Dengan sistim pemasaran yang cukup sulit tersebut ditambah dengan harga yang tidak menentu, maka dengan sendirinya pendapatan para petani garam tersebut akan sangat rendah. Hal lain bahwa kurangnya produktivitas ( akan dijelaskan secara terinci pada sub.c bab ini) para petani garam di Benteng pada kurun waktu 1950 sampai tahun 1960, adalah karena sarana pendukung penggaraman tersebut masih sangat sederhana.

### 3.2. Sistim Pembuatan Garam

Penggaraman adalah merupakan suatu bentuk aktivitas dari sebagian anggota masyarakat di Desa Benteng. Sebagai suatu bentuk aktivitas produksi, maka dengan sendirinya penggaraman tersebut merupakan suatu sistem yang terdiri dari suatu proses yang sistimatis untuk sampai pada pencapaian produksi garam.

Penggaraman yang dilakukan oleh masyarakat Benteng seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa penggaraman ini telah ada sejak jaman Belanda, pada dasarnya belum mengalami perubahan yang cukup berarti sampai pada dekade tahun 1980-an. Perubahan-perubahan yang terjadi hanya terlihat pada usaha kearah perbaikan mutu dan sistim pemasaran.

Dalam hubungannya dengan pembuatan garam di Benteng, penulis akan melihat pada beberapa proses produksi garam tersebut termasuk hal-hal yang terkait dengan pembuatan garam tersebut. Ada beberapa aspek yang menunjang terlaksananya pembuatan garam tersebut antara lain :

- a. Keadaan alam
- b. Alat-alat
- c. Tenaga kerja, termasuk cara kerja dan waktu kerja
- d. Sistim angkutan dan sarana penampungan garam.

Melihat hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuatan garam tersebut di atas, kelihatannya sampai pada proses penggudangan.



#### ad.a. Keadaan Alam

Syarat utama terjadinya proses penggaraman adalah dukungan alam yang dalam hal ini menyangkut iklim, jenis tanah, serta kadar garam air laut daerah tersebut. Usaha garam seperti yang dikemukakan oleh Hammado Tantu, bahwa usaha garam adalah pembuatan garam dapur atau natrium klorida ( NaCl ). Jenis garam ini dapat dipakai dalam makanan, sebagai pengawet bahan makanan kulit hewan, bahan hasil dalam industri soda, asam klorida dan gas klor dalam industri sabun, keramik dan sebagainya ( Hammado Tantu, 1988 : 284).

Pendukung utama dari pembuatan garam itu sendiri adalah air laut, yang menurut Hasan Shadily, bahwa air laut yang dapat diproses menjadi garam dapur ialah air laut yang mengandung kadar garam antara  $2\frac{1}{2}$  sampai 3 % ( Hammado Tantu, 1988 : 285). Dalam kaitan dengan kadar garam air laut yang dimaksudkan di atas, maka di Benteng juga termasuk mempunyai kadar garam seperti yang disebutkan tersebut.

Karena proses pembuatan garam pada dasarnya adalah menguapkan air laut yang mengandung kadar garam tertentu, maka faktor pemanasan ( cuaca dan iklim) ikut pula berperan. Sehubungan dengan pemanasan/penguapan ini, maka pada umumnya masyarakat Benteng mengadakan usaha penggaraman pada waktu-waktu tertentu (musim kemarau). Disamping pengaruh iklim, pengaruh keadaan tanah juga sangat menentukan, utama-

nya pada pembuatan garam secara tradisional termasuk di Benteng. Faktor jenis tanah ini berpengaruh, karena pada sistim penggaraman tradisional bahkan sampai sekarang memakai penguapan/jemuran alamiah dengan meja penggarman dari hamparan tanah yang sebelumnya dipadatkan.

Melihat proses kerja serta pendukung penggaraman tersebut di atas, maka penulis melihat bahwa sampai pada dekade 80-an ini masyarakat Benteng kebanyakan mempergunakan sistim/pembuatan garam dengan sistim tradisional.

#### ad.b. Alat-Alat Penggaraman

Sama dengan pendukung penggaraman seperti air laut dengan kadar garamnya, iklim serta jenis tanahnya, maka alat-alat yang dipergunakan oleh para pembuat garam tersebut sampai tahun 60-an ini belum mengalami perubahan yang cukup berarti. Perubahan-perubahan tersebut penulis hanya melihat pada bahan dasar alat-alatnya seperti halnya pakeke, linggis dan alat-alat lainnya yang sebelumnya masih kebanyakan terbuat dari kayu sampai sekarang kebanyakan terbuat dari besi. Perubahan itu pula penulis lihat pada tempat pengkristalan yang dulunya hanya dihamparkan pada tanah liat, sekarang telah menggunakan meja sebagai pendukungnya. Walaupun demikian, alat-alat yang dipergunakan oleh masyarakat Benteng masih kebanyakan dibuat sendiri oleh para petani garam. Ini berarti bahwa modernisasi belum berfungsi betul pada alat-alat penggaraman dalam masyarakat Benteng.

Sehubungan dengan alat-alat penggaraman masyarakat Benteng, dibawah ini penulis akan mengemukakan model dan fungsinya masing-masing :

1. Pakkeke (patiba), terbuat dari kayu. Berfungsi sebagai linggis untuk menggali atau membongkar bongkah-bongkah tanah yang berlumpur guna membuat pematang.
2. Bingkung (pacul), terbuat dari lempengan besi bergagang kayu. Berfungsi sama dengan pakkeke.
3. Sangko (sabit), juga terbuat dari lempengan besi, bergagang kayu, kegunaannya untuk menghaluskan dan memukul-mukul pematang petak-petak penggaraman.
4. Salaga (sisr=garu), terbuat dari kayu. Berfungsi untuk mengais kotoran, misalnya dedaunan yang ada didalam tanah persiapan meja penjemuran.
5. Pappeppe' (pemukul), terbuat dari kayu, yang digunakan untuk mengeraskan/memadatkan pematang.
6. Pa'dengka (penumbuk), fungsinya sama dengan pappeppe'.
7. Anak pa'dengka, terbuat dari kayu dengan model sama dengan pa'dengka yang ukurannya lebih kecil. Gunanya sebagai tumpuan apabila pa'dengka yang ukuran besar dipergunakan.
8. Pakke'ro (timba), terbuat dari daun lontar yang dianyam berbentuk kukusan, sekeliling mulutnya dikeraskan dengan bilah bambu. Berfungsi untuk menimba air laut yang akan dimasukkan ke petak penggaraman<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Menurut observasi penulis alat ini sejak tahun 1981, alat ini (timba) sudah mulai diganti dengan pompa air pakai mesin.

9. Balombang ( terowongan kekil), terbuat dari potongan bambu, berfungsi sebagai saluran pemindah air dari petak yang satu ke petak yang lainnya.
10. Pannosara' (perata) terbuat dari kayu, berfungsi untuk meratakan kristal-kristal garam yang baru terbentuk di meja penggaraman.
11. Pakkai' (pengais), juga dari kayu, berguna untuk mengais dan mengumpulkan kristal-kristal garam yang sudah dianggap baik ke dekat pematang.
12. Pakkai' Kalokko' (pengais melengkung), terbuat dari kayu, berguna untuk memindahkan kristal garam ke atas pematang, kemudian diangkat dengan kamboti dan pusa.  
( Dikutif dari penulisan Hammado Tantu, 1988 : 287-291 bersama dengan gambar/modelnya masing-masing terlampir).

Alat -alat tersebut di atas sejak awal penggaraman khususnya di Kelurahan Benteng yang ada sekarang, merupakan alat-alat yang digunakan sebagai alat utamanya. Alat tersebut di atas sampai pada tahun 80-an belum mengalami perubahan yang berarti, kecuali pada usaha perbaikan mutu garam ( akan dijelaskan pada bab ke IV).

#### ad.c. Proses pembuatan garam

Sebelum penulis menguraikan tentang proses pembuatan garam di Benteng, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan bagan tempat penggaraman tersebut agar lebih mudah dimengerti dan dipahami.

Bagan penggaraman tersebut merupakan bagan sistim penggaraman tradisional termasuk dipakai oleh para petani garam di Benteng pada kurun waktu 1950-1960.

Pada dasarnya model penggaraman tradisional di Benteng terbagi atas tiga bahagian utama ( Hammado Tantu, 1988 : 293), sebagai berikut :

Pertama (petakpetak B), bagian yang terdiri atas petak-petak atau kolom penampungan air dingin, yaitu air laut yang baru dimasukkan ( nike'ro).

Kedua (petakpetak C), bagian yang terdiri dari petak-petak atau kolom penampungan air panas. Yaitu air yang dipindahkan dari kolom air dingin (petakpetak B), setelah dijemur beberapa saat lamanya.

Ketiga (petakpetak D), bagian yang terdiri dari petakpetak atau meja penjemuran terakhir (dari air panas menjadi kristal-kristal garam). Lama penjemuran tergantung pada kualitas atau besar kecilnya kristal garam yang diinginkan.

Dengan adanya petakpetak sebagai wadah penggaraman tersebut, maka para petani mulai mengadakan pembuatan garam dengan proses sebagai berikut :

Menurut Hammado Tantu, ( 1988 :293) bahwa proses pembuatan garam tersebut terdiri dari tiga tahap antara lain;

Tahap I, adalah pemasukan air laut kedalam petakpetak air dingin, dengan alat-alat seperti disebutkan di muka.

Tahap II, pemindahan air dingin ke dalam petak-petak air panas (petak-petak C). Pada petak C ini air laut yang

sudah mulai panas disimpan beberapa lamanya untuk lebih meningkatkan temperaturnya serta kepadatannya. Tahap III, adalah memasukkan air panas ke dalam meja penjemuran (petak-petak D). Pada tahap inilah kristal-kristal garam dapur tersebut terbentuk. Lamanya waktu penjemuran ini, akan menentukan kualitas garam yang dihasilkan. Misalnya semakin lama waktu penjemurannya baru di kais, makin besar kristal garamnya.

Disamping itu, semakin besar kristal garam dan makin putih atau bersih semakin tinggi kualitas garam itu. Pada penjelasan di muka telah dikemukakan alat-alat pendukung penggaraman tersebut, sehingga sampai pada tahap yang paling akhir bahkan sampai pada pemasaran hasil penggaraman tersebut. Berarti bahwa setelah tahap yang ke III tersebut di atas, maka para petani garam sudah mulai berhasil yang selanjutnya akan ditampung atau dijual langsung kepada para pembeli (pedagang pengumpul).

Setelah para petani tersebut berhasil dalam pembuatan garam tersebut, maka oleh para petani sebelum mengadakan penjualan para petani tersebut menyelesaikan beberapa hal yang menyangkut hasil penggaramannya itu. Misalnya bagi seorang petani yang hanya menggarap tanah milik orang (Pattesang), membagi hasil penggaramannya tadi dengan para pemilik tanah. Disamping itu para pekerja tersebut juga mulai menghitung upah para pekerjanya bagi yang memakai pekerja. Kecuali bagi orang yang memang mengerjakan tanah miliknya sendiri.

### 3.3. Produktivitas

Untuk melihat dengan jelas produktifitas dalam hubungannya dengan petani garam di Benteng, khususnya pada periode tahun 195--1960, maka penulis mengutip pendapat para ahli tentang produktifitas itu sendiri. L.Grennberg mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut (Muchdarsyah Sinuangan, 1987 : 8). Selain itu, produktifitas juga diartikan sebagai :

- a. Perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil
- b. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satu-satuan (unit) umum ( Muchdarsyah Sinuangan, 1987 : Ibid).

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan seperti tersebut di atas, dalam kaitannya dengan penggaraman di Benteng, penulis akan mengemukakan beberapa gambaran kehidupan para petani garam khususnya yang sudah melakukan penggaraman pada periode tersebut.

Pertama, seorang petani garam yang sekarang sudah berumur 60 tahun (berarti pada tahun 50-an berumur sekitar 20 tahun) yang bernama Kamran. Menurut penuturan beliau, bahwa pada saat ia masih remaja cara penggaraman di Benteng masih dilaksanakan dengan sangat sederhana disamping penggunaan alat-alat yang juga sederhana. Menurut penuturannya, bahwa ia hanya mempunyai sedikit tanah

tuk utang), sehingga hasil yang diperolehnya hampir semuanya diambil oleh para pemilik tanah tersebut.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan salah seorang dari pegaram di Benteng dengan status pegaram Pattesang (mengerjakan bukan miliknya sendiri). Sesuai hasil wawancara dengan Jaloha, yang sampai sekarang sudah berumur 63 tahun, mengatakan bahwa cara kerja penggaraman yang dilakukannya sebanyak 3 kali setahun. Dari hasil sebanyak tiga kali panen tersebut setiap berhasil langsung dibagi kepada pemilik tanah. Sistem pembagian hasil ini dengan perbandingan 2 bahagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik tanah penggaraman tersebut. Perbandingan seperti merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Benteng khususnya dalam hal hubungan kerja penggaraman. Menurut Jaloha, bahwa dengan hasil yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai Pattesang tanah penggaraman belum mampu menutupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya apalagi setelah ia berkeluarga. Sehingga dengan keadaan seperti ini ia berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan. Pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Jaloha adalah bertani kebun (berladang). Dalam hal Tesang yang dilakukan oleh Jaloha (termasuk sebahagian besar masyarakat di Benteng), kebanyakan dilakukan dengan kerabat keluarga. Hal ini didasarkan pada pendapat, bahwa lebih baik hasil tersebut dibagi dengan keluarga dari harus dibagi dengan orang lain, walaupun tidak menutup kemungkinan tanah penggaramannya dikerjakan oleh orang lain (bukan keluarga).

tuk utang), sehingga hasil yang diperolehnya hampir semuanya diambil oleh para pemilik tanah tersebut.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan salah seorang dari pegaram di Benteng dengan status pegaram Pottesang (mengerjakan bukan miliknya sendiri). Sesuai hasil wawancara dengan Jaloha, yang sampai sekarang sudah berumur 63 tahun, mengatakan bahwa cara kerja penggaraman yang dilakukannya sebanyak 3 kali setahun. Dari hasil sebanyak tiga kali panen tersebut setiap berhasil langsung dibagi kepada pemilik tanah. Sistem pembagian hasil ini dengan perbandingan 2 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik tanah penggaraman tersebut. Perbandingan seperti merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Benteng khususnya dalam hal hubungan kerja penggaraman. Menurut Jaloha, bahwa dengan hasil yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai Pottesang tanah penggaraman belum mampu menutupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya apalagi setelah ia berkeluarga. Sehingga dengan keadaan seperti ini ia berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan. Pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Jaloha adalah bertani kebun (berladang). Dalam hal Tesang yang dilakukan oleh Jaloha (termasuk sebahagian besar masyarakat di Benteng), kebanyakan dilakukan dengan kerabat keluarga. Hal ini didasarkan pada pendapat, bahwa lebih baik hasil tersebut dibagi dengan keluarga dari harus dibagi dengan orang lain, walaupun tidak menutup kemungkinan tanah penggaramannya dikerjakan oleh orang lain (bukan keluarga).

Walaupun Jaloha tidak menjelaskan mengenai pendapatannya secara terinci (angka-angka), namun dengan melihat keadaan dan gambaran kehidupannya dapat diambil kesimpulan bahwa kehidupannya masih cukup rendah. Hal lain dari gambaran kehidupannya hal mana bahwa dari 2 orang anaknya tidak ada yang mampu menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Menurut beliau, bahwa hal ini disebabkan oleh kurang mampunya dia (Jaloha) untuk membiayai anaknya sekolah. Disamping itu juga dikatakan, bahwa kalau anaknya sekolah tidak ada yang akan membantu orang tuanya di kampung.

Bertolak dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan seorang petani garam (Pattesang) di atas, maka penulis melihat beberapa hal yang penting dari penuturannya antara lain :

- Hubungan kerja dengan Tesang
- Gambaran Penghasilan, walaupun bukan dalam bentuk angka-angka kongkrit.
- Gambaran pengaruh pendapatan terhadap kelanjutan pendidikan anak/keluarga.

(Ketiga hal-hal di atas akan dijelaskan khusus pada bagian Dampak Sosial Ekonomi' sub bab 3.4).

Selain kedua sistim kerja penggaraman seperti yang telah dikemukakan di atas, pada masyarakat Benteng juga terjadi satu bentuk sistem penggaraman, yakni para petani garam mengolah tanah milik orang lain dengan memakai pekerja.

Sistem hubungan kerja seperti pada periode tahun 1950 sampai dengan tahun 1960 masih sangat kurang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena kurang mendukungnya hasil penggarapan mereka untuk mengupah para pekerja apalagi dengan sistem bagi hasil kepada para pemilik tanah. Namun demikian penulis akan mengemukakan hasil wawancara dengan seorang petani garam yang pernah melaksanakan bentuk kerja sama tersebut.

Hambe yang sekarang telah berumur 61 tahun, pernah menggarap tanah milik orang lain, disamping mempekerjakan 2 orang pekerja untuk membantu pengolahannya. Namun menurut penuturan Hambe bahwa hal ini tidak cocok, oleh karena gaji para pekerja semuanya diambil dari bahagian pantesang (penggarap), sehingga hasil bersih yang diperoleh para pekerja sangat minim. Apalagi dalam pengolahan seperti ini para pekerja yang kebanyakan dari para remaja, kebutuhan hidupnya kebanyakan ditanggung oleh penggarap sendiri. Menurut beliau, kelebihan pengolahan tanah penggarapan dengan mempekerjakan orang lain walaupun bukan milik sendiri adalah karena kemungkinan untuk mengolah lahan penggarapan lebih luas, sehingga hasilnya dengan sendirinya akan lebih besar dibanding dengan bekerja sendiri<sup>5</sup>.

Gambaran hubungan kerja tersebut di atas terlihat bahwa pada periode tahun 1950-1960 hubungan kerja masyarakat masih mengutamakan sifat kegotong royongan.

<sup>5</sup>Wawancara. Hambe, tanggal 13 November 1991 di Benteng.

### 3.4. Dampak Sosial Ekonomi

Setelah dijelaskan mengenai keadaan petani garam di Benteng pada periode 1950 sampai tahun 1960, sistem pembuatan garam serta produktifitas yang dalam hal ini penulis mengemukakan tentang gambaran kehidupan para petani garam khususnya yang telah hidup dan bekerja pada periode tersebut. Seperti penjeian di muka, bahwa pada masa ini keadaan masyarakat masih dipengaruhi oleh keadaan dan situasi politik yang ada pada saat itu, sistim penggaraman dengan alat-alat yang masih sangat sederhana sehingga produktifitasnyapun masih sangat sederhana. Bahkan dari hasil penggambaran tentang kehidupan para petani garam di Benteng masih tergolong rendah sebagai akibat dari pengaruh keadaan politik, disamping sarana pendukung penggaramannya masih sangat sederhana.

Dalam keadaan seperti di atas, maka dengan sendirinya kondisi ekonomi, bahkan kondisi sosial masyarakat akan ikut terbawah oleh keadaan tersebut. Kondisi ekonomi yang dimaksudkan disini adalah menyangkut tingkat pendapatan para petani garam di Benteng. Sedangkan kondisi sosial masyarakat seperti sistim hubungan kerja sama, sistim pendidikan serta aspek-aspek sosial lainnya juga ikut pada kondisi masyarakatnya.

Sehubungan dengan kehidupan petani garam di Benteng pada periode tahun 1950 sampai dengan tahun 1960, penulis akan melihat beberapa dampak sosial ekonominya. Dampak yang dimaksudkan disini sebagai hasil pengaruh dari kehi-

dupan petani garam, antara lain menyangkut :

- a. Sistem hubungan kerja petani
- b. Dampak atau pengaruh terhadap pendidikan
- c. Dampak ekonomi ( analisis tentang kehidupan petani garam di Benteng pada tahun 1950-1960)

ad.a. **Sistem** hubungan kerja petani

Dalam hubungannya dengan sistem kerjasama antara petani di Benteng, oleh Hammado Tantu dalam penelitiannya mengatakan, bahwa :

Dalam usaha produksi garam terdapat dua pihak yang saling berkepentingan. Satu pihak adalah para pemilik dan pengusaha garam ( Tu-Appatesang dan pedagang), dan pihak lain adalah penggarap dan buruh garam ( Pattesang dan sawi). Pattesang dan sawi tersebut adalah pekerja yang menjadikan tenaganya sebagai modal dalam proses produksi garam. Sekali melibatkan diri dalam usaha garam seorang pemilik, seterusnya akan tetap menggantungkan nasib dan hidupnya pada pemilik atau pengusaha garam tersebut ( Hammado Tantu, 1978 : 281).

Kelihat penjelasan tersebut di atas, maka menunjukkan bahwa dalam usaha penggaraman itu ada empat golongan masyarakat yang terlibat didalamnya. Pertama adalah pemilik penggaraman (pemilik tanah penggaraman). Golongan ini biasa juga menggarap sendiri tanah penggaramannya tersebut, akan tetapi apabila seseorang pemilik oleh karena alasan tertentu misalnya karena sudah tidak mampu menggarap atau karena memang tanah penggaramannya banyak, maka pada saat seperti ini mereka biasanya memberikan kepada orang lain untuk diolah dalam bentuk kerja sama ( Tesang).

Apabila dilihat secara seksama hubungan kerja petani garam dalam bentuk Tesang khususnya di Benteng, terlihat ada beberapa unsur yang melatarbelakanginya. Unsur-unsur yang dimaksudkan oleh penulis antara lain terlihat adanya unsur kasih sayang yang dalam hal ini keinginan untuk membantu sesama. Unsur lain adalah adanya sifat kerjasama diantara mereka. Maksudnya keinginan untuk sama-sama berhasil dan menikmati hasil-hasilnya tersebut. Sedangkan unsur yang terakhir adalah karena tidak adanya waktu atau karena memang tanah penggaramannya luas seperti disebutkan di atas.

Seperti telah dijelaskan di muka, bahwa hubungan kerja dalam bentuk tesang ini ada beberapa macam. Antara lain hubungan antara seorang pemilik dengan seorang penggarap atau patesang, hubungan antara seorang pemilik dengan dua atau lebih orang patesang dan hubungan yang lainnya adalah hubungan antara beberapa orang ~~Ta~~-Appatesang dengan seorang patesang. Hubungan kerja yang penulis sebutkan terakhir merupakan hubungan kerja yang berantai, oleh karena patesang semacam ini biasanya menggunakan beberapa orang pekerja.

Dengan demikian maka terlihat adanya golongan kedua dalam usaha penggaraman tersebut yakni para pekerja atau patesang. Pekerja atau Patesang ini juga ada dua macam yaitu pekerja yang mengerjakan sendiri dan yang kedua

pekerja yang mempekerjakan orang lain.

Sedangkan golongan yang ketiga dan keempat adalah para pekerja ( bukan Pattesang) dan para pedagang garam atau pedagang pacce'lang. Pedagang pacce'lang ini biasanya dilakukan dalam bentuk langsung, yaitu langsung kepada para penggarap ada juga yang membelinya dari beberapa orang pedagang kecil (pengumpul).

Melihat hubungan kerja para petani garam di Benteng pada kurun waktu 1950-1960, terlihat bahwa ada beberapa aspek sosial yang terjadi didalamnya, Aspek-aspek sosial tersebut yakni adanya hubungan kerja sama yang didasari oleh keinginan untuk saling membantu, kerjasama untuk keberhasilannya, yang keseluruhannya merupakan mata rantai kehidupan masyarakat pedesaan yang didasari oleh jiwa gotong royong yang kuat.

ad.b.Pengaruh terhadap pendidikan

Pengaruh pendidikan yang dimaksudkan oleh penulis adalah tingkat pendidikan para anggota keluarga petani garam. Tingkat pendidikan ini apakah berhasil atau tidak sebagai hasil nyata dari tingkat pendapatan para petani garam itu sendiri.

Tingkat pendidikan sebagai dampak petani garam terhadap anggota keluarganya ini, untuk periode tahun 1950-1960, maka penulis kembali melihat beberapa anggota keluarga yang diperkirakan oleh penulis bahwa pada periode tersebut berada pada usia sekolah.

Berikut ini wawancara dengan beberapa orang petani garam yang orang tuanya sejak dari dulu bekerja sebagai petani garam antara lain :

- Dg. Ngelang yang sekarang telah berumur 56 tahun dengan pekerjaan sebagai petani garam, menurut dia bahwa orang tuanya sejak dahulu kala memang bekerja sebagai petani termasuk petani garam. Dg. Ngelang yang hanya tamat SD menuturkan, bahwa sejak ia kecil (masa sekolah) orang tuanya tidak mampu menyekolahkan kesekolah yang lebih tinggi. Hal ini diakibatkan oleh kurang mampunya orang tua di bidang ekonomi, pembiayaan dan karena jauhnya lokasi sekolah (tingkat menengah) dari kampungnya. Menurut beliau bahwa pada saat itu (tahun 1950-an) pada dasarnya sudah ada kebebasan untuk bersekolah, artinya tidak ada pembedaan lagi, namun kemampuanlah yang menentukan.<sup>6</sup>
- Demikian juga halnya dengan Kulle, yang sekarang juga bekerja sebagai petani garam (pattesang). Sama dengan Dg. Ngelang, Kulle juga hanya berpendidikan sederajat SD (Tidak dijelaskan sekolah apa), juga menuturkan, bahwa tidak lanjutnya sekolahnya kesekolah yang lebih tinggi karena kemampuan orang tua. Apalagi dengan status orang tuanya pada saat itu sebagai pattesang, berarti hasilnya akan dibagi terhadap pemilik tanah dan untuk keluarganya.

---

<sup>6</sup> Wawancara. Dg. Ngelang, di Benteng tanggal 13 November 1991.

Hal lain menurut Kulle, bahwa tidak lanjutnya sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi karena tidak ada yang bisa membantu orang tua di kampung<sup>7</sup>.

Sehubungan dengan tingkat pendidikan keluarga petani di Benteng untuk periode tahun 1950-1960, penulis juga mengutip hasil penelitian Hammado Tantu yang mengambil sampel sebanyak 200 orang. Diantara 200 orang tersebut 73 % dari para petani garam yang hanya berpendidikan tingkat SD ( tamat dan tidak tamat), yaitu sebanyak 146 orang ( Hammado Tantu, 1978 : 299).

Bertolak dari kenyataan di atas, maka kelihatannya tidak mampunya para petani garam meningkatkan pendidikan anggota keluarganya utamanya disebabkan oleh tingkat kemampuan ekonominya yang masih sangat rendah khususnya pada periode tahun 1950-1960.

#### ad.c. Tingkat Pendapatan

Melihat gambaran kehidupan para petani garam di Benteng pada periode tahun 1950 sampai tahun 1960 baik karena pengaruh sistim politik, keadaan alam, cara kerja penggaraman serta alat-alat pendukung penggaraman produktivitas dan gambaran kehidupan beberapa petani garam, maka kelihatannya kehidupannya memang masih berada dibawah taraf miskin. Berarti analisa Hammado Tantu yang mengatakan bahwa kehidupan para pedagang garam lebih baik dibandingkan dengan kehidupan para pekerja adalah benar.

### 1.1. Beberapa Perubahan Sistem

Munculnya suatu bentuk aktivitas manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhannya, dengan sendirinya mengalami perubahan-perubahan sebagai realisasi dari perubahan pola pikir dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Perubahan pola pikir misalnya perubahan suatu sistem pertanian dari bentuk-bentuk pertanian tradisional berubah menjadi suatu bentuk pertanian modern. Hal semacam ini sebagai konsekuensi dari keberadaan manusia itu sendiri untuk selalu mengarah pada kehidupan yang lebih baik.

Demikian juga halnya dengan suatu sistem pertanian masyarakat di Kelurahan Benteng, yakni pertanian garam (penggaraman), yang juga mengalami perubahan sistem atau cara pengolahannya yang diikuti oleh perubahan-perubahan alat-alat pendukungnya. Perubahan ini juga sebagai akibat dari keberadaan masyarakat Benteng untuk selalu mengarah pada perkembangan demi peningkatan taraf hidupnya.

Sehubungan dengan perubahan sistem penggaraman di Benteng sejak tahun 1950 sampai pada tahun 1980 ini pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang besar. Seperti yang telah digambarkan di muka, bahwa pada periode tahun 1950-1960 sistem penggaraman yang dilakukan oleh masyarakat Benteng masih bersifat tradisional, termasuk alat-alat pendukung penggaraman tersebut.

Bahkan menurut hasil wawancara penulis, dan hasil observasi yang dilakukan penulis di Desa Benteng, bahwa pada dekade 60-an sistem penggaraman di Kelurahan Benteng juga belum mengalami perubahan yang berarti. Hal ini penulis lihat dari segi alat-alat pendukung dan cara penggaraman sendiri, yang masih tetap menggunakan alat-alat seperti yang dipergunakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan sistem termasuk alat-alat penggaraman di Benteng sesuai dengan hasil wawancara penulis, nanti nanti terjadi pada dekade 80-an. Seperti diungkapkan oleh Dg.Gassing, bahwa :

Pada sekitar tahun 80-an para petani garam di Kelurahan Benteng sudah banyak yang menggunakan pompa air (pompa mesin), untuk mengalirkan air laut kedalam petak penggarannya. Juga diungkapkan bahwa pada saat itu juga perubahan mutu garam di sarankan oleh pemerintah, termasuk sistim pemasarannya (dijual lewat KUD) sehingga alat penjemuran dan lamanya penjemuran lebih diperbaiki dan lebih lama (sekitar satu minggu) untuk mencapai kualitas garam yang lebih bagus.

Melihat penuturan seperti ini, maka terlihat bahwa perubahan-perubahan yang terjadi sehubungan dengan sistim penggaraman di Kelurahan Benteng menjelang tahun 80-an adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan alat-alat pendukung penggaraman
- b. Perubahan mutu garam
- c. Perubahan sistim pemasaran
- d. Perubahan sistim pemilikan tanah.

1) Wawancara. Dg.Gassing, tanggal 13 November 1991 di Benteng.

#### ad.a. Perubahan alat penggaraman

Perubahan alat-alat pendukung penggaraman di Kelurahan Benteng menjelang th. 80, yang paling utama adalah alat pemompa air ke dalam petak-petak penggaraman. Sebagaimana disebutkan dimuka, bahwa pada sistim tradisional memasukkan air ke petak-petak penggaraman dilakukan dengan menggunakan pa'kero ( timba ) yang terbuat dari daun lontar yang dianyam dalam bentuk kukusan.

Menjelang th. 80 ini alat-alat yang digunakan oleh sebahagian anggota masyarakat Benteng untuk memasukkan air ke dalam petak-petak penggaraman adalah dengan memakai pompa mesin. Pompa mesin ini dipasang pada daerah yang dekat dengan air laut, dengan memakai slang dapat mengalirkan air ke dalam petak-petak penggaraman. Walaupun pada dasarnya pemakaian alat-alat (mesin pompa) ini tidak semua anggota masyarakat menggunakannya. Hal ini terjadi karena kemampuan para petani garam belum mampu membeli mesin pompa tersebut yang cukup mahal.

Walaupun demikian, usaha pemilikan alat pemompa air laut tersebut sudah diusahakan dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah seperti dalam bentuk pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat kepada BRI atau KUD<sup>2</sup>. Dengan adanya sistim seperti lebih memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki pompa air dengan sistim pengembalian kredit.

---

<sup>2</sup> Wawancara. Dg. Ngelang, tanggal 13 November 1991 di Benteng.

Perubahan alat-alat pendukung penggaraman di Benteng termasuk juga alat-alat yang dulunya hanya memakai kayu, sekarang hampir keseluruhan alat tersebut terbuat dari besi dan bisa langsung di beli di pasar-pasar.

Dengan perubahan alat-alat pendukung penggaraman seperti di atas, pada dasarnya mempunyai akibat dan pengaruh yang cukup besar terhadap para pegaram khususnya kepada para sawi ( buruh kerja penggaraman). Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perubahan alat tersebut akan dijelaskan pada sub 4 bab ini.

#### ad.b. Perubahan mutu garam

Garam sebagai salah satu bahan pokok yang kebijakannya termasuk pengadaan, pemasaran dan kualitasnya ditangani oleh pemerintah. Demikian juga halnya dengan usaha perubahan mutu garam di Kelurahan Benteng, yang mana bahwa sejak adanya keputusan-keputusan baik mengenai pengadaannya, maupun pemasaran dan kualitasnya masyarakatnyapun sudah mulai mengadakan perbaikan mutu garamnya walaupun belum sampai pada yodisasi. Perubahan mutu garam di Benteng baru berkisar pada pengolahan dengan kristal yang lebih besar dan bersih.

Berikut penulis akan mengutip beberapa keputusan sehubungan dengan penggaraman yang dikeluarkan oleh

- a. Keputusan Menteri Perdagangan No. 96/KP/V/1976, tentang pengadaan garam dan penyaluran garam yang mengatur :

1. Pengadaan dan penyaluran garam yang berasal dari luar negeri.
  2. Perencanaan dan pengaturan pola konsumsi garam baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan sektor industri dan lain sebagainya.
  3. Kualitas disesuaikan dengan arah perbaikan menu-rut makanan rakyat antara lain masalah garam beryodium sebagai salah satu usaha pencegahan penyakit gondok.
  4. Jumlah garam yang diimpor disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak mengganggu industri garam dalam negeri, termasuk mutu garam dalam waktu tertentu.
- b. Keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor 114/KP IV/80, tentang tata niaga garam hasil produksi dalam negeri, yang mengatur :
2. Peranan KUD sebagai wadah petani garam dalam hal informasi tentang harga dasar garam yang ditetapkan oleh PN garam.  
PN garam bersama KUD setempat membeli garam dari petani garam dalam rangka memenuhi stock garam nasional dan melindungi petani produsen garam pada saat harga garam di pasaran bebas lebih rendah dari harga dasar.
  4. Penyaluran garam dilakukan oleh penyalur-penyialur yang ditunjuk oleh PN. Garam. Persero Niaga, Koperasi, perusahaan swasta yang telah disyahkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan dalam negeri Cq Direktur penyaluran.  
Penunjukkan penyalur dilakukan dengan mengutamakan koperasi dan golongan ekonomi lemah.
  6. Harga dasar bagi petani produsen dan harga dasar bagi konsumen ditiap-tiap Ibukota Propinsi.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 116/DAGRI/KP/IV/80, tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 114/KP/IV/80, tanggal 3 April 1980 tentang Tata Niaga Garam hasil produksi Dalam Negeri (Dokumentasi, KUD Sama Jaya Kelurahan Benteng, juga dikemukakan dalam penulisan Daerah Penggaraman di Sulawesi Selatan).

Selanjutnya mengenai penetapan harga garam dan kualitasnya, dapat dilihat pada Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 154/Kp/V/82, tentang penetapan harga dasar pembelian garam produksi dalam negeri yang mengatur :

1. Harga dasar garam di ladang petani produsen garam, yaitu untuk garam :  
Kualitas I Rp. 25,-/Kg  
Kualitas II Rp. 21,-/Kg  
Kualitas III Rp. 17,50.-/Kg
2. Penentuan kualitas garam dibuat oleh Direktorat Jenderal Aneka Industri Departemen Perindustrian.
3. Fungsi Ferum Garam dan KUD dalam hal menstabilkan harga garam dan melindungi petani produsen garam pada waktu panen besar.

Dengan keluarnya keputusan-keputusan tentang mutu, garam, pengelolah atau penyalur garam serta harga dasar penjualan garam tersebut, di Kelurahan Benteng juga mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut, melalui Departemen Perindustrian Kabupaten Dati II Jeneponto. Disamping itu, menurut para petani garam, penyuluhan seperti ini dalam hal mutu garam serta harga juga biasa dilakukan oleh para pengurus KUD ( KUD Sama Jaya ) sekaligus menampung hasil-hasil yang mereka peroleh. Namun demikian, KUD menjelang tahun-tahun 80-an belum mampu menampung seluruh hasil produksi garam masyarakat Benteng, karena kurangnya dana.

ad.c. Perubahan sistim pemasaran.

Pada penjelasan di muka, telah dijelaskan, bahwa pada periode tahun 1950-1960 sistim pemasaran garam yang dilakukan oleh masyarakat Benteng, kebanyakan langsung dijual kepada para pedagang (pedagang pengumpul) atau biasa juga dengan jalan menjual sendiri ke pasaran. Namun keadaan seperti ini dengan sendirinya mempunyai akibat-akibat yang kurang baik, utamanya kepada para produsen garam itu sendiri, karena adanya permainan harga atau tidak stabilnya harga.

Selanjutnya pada periode tahun 1960-1980 sistim tersebut di atas sudah mulai berubah, dengan adanya standar harga dan penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah, yang dalam hal ini PN Garam dan KUD. Walaupun demikian belum keseluruhannya ditampung oleh kedua penyalur tersebut, maksudnya masih ada diantara pegaram yang menjual langsung kepada para pedagang.

ad.d. Perubahan sistim pemilikan tanah

Pada bab tiga di muka telah dijelaskan mengenai sistim pemilikan tanah oleh masyarakat Benteng, yakni antara lain milik sendiri, penggarap (bukan milik sendiri), serta para penggarap atau pottesang. Berarti pada dasarnya pemilikan tanah pada saat itu hanya dua macam yaitu milik sendiri dan para pottesang.

Sedangkan pada menjelang tahun 80 sistim pemilikan tanah oleh masyarakat berkembang menjadi tiga macam yaitu

dengan adanya sistim sewa menyewa (observasi penulis). Hal ini terjadi menurut analisa penulis, karena adanya perkembangan masyarakat termasuk perkembangan tingkat ekonomi masyarakat, sehingga mereka menganggap sistim sewa menyewa ini lebih praktis. Walaupun demikian dengan adanya sistim sewa menyewa ini berarti ada unsur-unsur hubungan dalam masyarakat yang hilang yakni berkurangnya nilai gotongroyong.

#### 4.2. Produktivitas

Perubahan-perubahan sistem dalam kaitannya dengan petani garam di atas, dengan sendirinya produktivitas juga ikut berubah. Misalnya perubahan alat pendukung penggaraman dengan sistim pompanisasi, dengan sendirinya akan mengurangi pemakaian tenaga kerja yang berarti pengurangan biaya pengolahan. Demikian juga halnya dengan adanya perubahan-perubahan sistim pemasaran yakni adanya penanganan KUD dan PN garam, maka dengan sendirinya para petani garam tidak akan dirugikan dalam hal harga garam, bahkan ada kemudahan dan bantuan berupa pengambilan kredit para petani garam sebelum berhasil. Sehingga dengan keadaan seperti ini para pegaram utamanya patesang, tidak lagi mengharapkan bantuan sepenuhnya kepada para pemilik tanah. Sedangkan perubahan mutu garam juga sangat berpengaruh, karena merupakan ukuran bagi penentuan harga garam yang dihasilkan oleh seorang petani. Sehingga dengan demikian para petani garam dengan sendirinya berusaha agar hasilnya mempunyai mutu yang bagus.

Dengan keadaan seperti di atas, maka dengan sendirinya pendapatan para petani garam akan meningkat pula.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa gambaran petani garam di Kelurahan Benteng sebagai berikut :

Dg. Nuntung, seorang pemilik tanah penggaraman yang luasnya kurang lebih 40 are. Dari 40 are lahan penggaraman tersebut apabila datang musim kemarau, lahan penggaramannya sebahagian dikelola sendiri dan sebagian lainnya diberikan kepada orang lain untuk diolah dalam bentuk tesang.

Untuk melihat produktivitas Dg. Nuntung dari lahan penggaraman yang dikelolanya kurang lebih 20 are adalah sebagai berikut :

Dg. Nuntung dalam mengolah tanah penggaramannya tadi, menggunakan seorang sawi sebagai pekerja yang membantu dalam proses penggaramannya. Dg. Nuntung yang mempergunakan pompa air sebagai alat pendukung penggaramannya. Berarti bahwa modal kerja dari penggaramannya cukup besar, termasuk para pekerjanya (sawinya). Penggaraman yang dilakukan dari bulan Juli sampai November ( kalau musim kemarau panjang), Dg. Nuntung biasa memperoleh garam untuk satu kali panen kurang lebih 1400 blek ( 1 blek = 18 kg). Ini berarti bahwa Dg. Nuntung setiap musim penggaramannya memperoleh hasil kurang lebih 25.200 kg dengan harga Rp. 529.000 ribu apabila dirata-rata harganya Rp. 21 / kg.

Oleh karena Dg. Nuntung menggunakan seorang sawi sebagai pekerja, maka dengan sendirinya pekerjanya itu

ga mendapat bahagian yang hampir sama dengan patesang  
itu sebanyak sepertiga dari hasil yang diperolehnya.  
ngan demikian berarti sawi Dg, Nuntung tadi memperoleh  
rang lebih 450 blek atau 8100 kg atau sebanyak Rp.170.000  
ertahun. Berarti bahwa hasil bersih yang diperoleh  
g, Nuntung dari hasil penggaramannya seluas 20 are terse-  
t adalah :

$$\text{Rp.}529.000 - 170.000 = 359.000$$

ari Rp.359.000 tersebut masih termasuk biaya pompa mesin  
ng menggunakan bahan bakar. Ini diperkirakan memakan  
iaya Rp.100.000 termasuk biaya-biaya lainnya. Dengan de-  
ikian Dg, Nuntung hanya memperoleh hasil bersih sebanyak  
p.259.000 pertahun atau 21.583 perbulannya.

Sebahagian dari tanah penggaraman Dg, Nuntung tadi  
ikelolah oleh seorang kerabat dekatnya dengan sistim  
agi hasil yakni seluas 20 are. Luas areal penggaraman yang  
igarap oleh Kulle itu, juga dikelolanya dengan menggunakan  
mpa air. Akan tetapi dalam pengeloleannya Kulle tidak  
gunakan sawi, tetapi anya dibantu oleh anaknya sendiri.  
alam setiap musim penggaraman kalau musim kemarau panjang,  
aka Kulle biasanya memperoleh hasil sekitar 1400-1500 blek.  
asil tersebut di atas kemudian dibagi kepada Dg, Nuntung  
ngan perbandingan  $\frac{2}{3}$  untuk Kulle (patesang) dan  $\frac{1}{3}$   
ahagian untuk Dg, Nuntung sebagai tu-~~app~~patesang. Dengan  
asil seperti itu ( 1500 blek) Kulle mendapat bahagian  
ebanyak 1000 blek atau 18000kg yang apabila diuangkan

rang lebih 18.000 kg kali 21 = Rp. 378.000/tahun.  
 au dengan kata lain rata Kulle memperoleh hasil se-  
 nyak Rp.20.000 perbulan, dari hasil penggaramannya.

Selanjutnya penulis juga akan mengemukakan  
 orang petani garam dengan sistim sewa. Haris sebagai  
 orang petani garam yang menyewa tanah penggaraman  
 tuk diolahnya. Haris yang biasanya menyewa lahan peng-  
 raman yang luasnya berkisar 15 are dan dikerjakan sen-  
 ri. Tanah seluas itu oleh Haris menyewanya kepada pemi-  
 k tanah sebesar Rp.100.000/tahun. Berarti bahwa Haris  
 iak ada hubungan lagi dengan pemilik tanah utamanya  
 ngenai hasilnya.

Haris yang menyewa tanah seluas itu, biasanya mem-  
 roleh hasil berkisar 1000-1200 blek. Dari hasil se-  
 rti itu, kelihatannya, bahwa hasilnya tidak jauh berbeda  
 ngan hasil yang diperoleh para patesang. Hanya saja,  
 hwa dengan sistim sewa menyewa ini semua resiko termasuk  
 rugian harus ditanggung sendiri oleh penyewa, demikian  
 la sebaliknya.

Melihat gambaran produktivitas petani-petani garam  
 Kelurahan Benteng tersebut di atas, menunjukkan bahwa  
 lah mengalami peningkatan. Apalagi hasil tersebut baru  
 da usaha penggaramannya, sementara pada umumnya masyarakat  
 ateng disamping sebagai petani garam juga bersawah atau  
 rladang sebagai bantaun penghasilannya ( untuk lebih  
 lasnya dapat dilihat pada potret petani garam berhasil).

## . Tingkat Kehidupan Petani

Perubahan-perubahan tingkat kehidupan petani garam Kelurahan Benteng, khususnya pada dekade 80-an, menunjukkan perubahan yang cukup baik. Maksudnya bahwa sejak tahun 1980-an tersebut kehidupannya lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya.

Gambaran tentang perubahan-perubahan tingkat kehidupan petani garam tersebut dapat dilihat pada sarana dan prasarana kehidupan serta kemampuan para petani garam itu untuk menyekolahkan anak-anak mereka, bahkan sudah ada yang sampai pada perguruan Tinggi.

Seperti halnya Jamaluddin Dg. Nuntung, salah seorang petani garam yang tinggal di Allu Kelurahan Benteng Kabupaten Jeneponto, yang mana bahwa sejak tahun 1979 keluarga Jamaluddin Dg. Nuntung telah mempunyai sebuah rumah permanen dengan masuk sarana dan prasarana rumah tangga. Bahkan Dg. Nuntung sendiri telah mampu menyediakan sarana pendukung untuk lancaran usahanya (penggaramannya) seperti adanya kendaraan yang dimilikinya. Demikian juga halnya dengan perubahan tingkat pendidikan anak-anaknya, hal mana bahwa Jamaluddin Nuntung yang mempunyai 4 orang anak dua diantaranya telah kuliah di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dg. Nuntung yang pekerjaannya disamping sebagai petani garam, juga mempunyai usaha-usaha lainnya seperti mobil (angkutan) serta pompa air (untuk penggaraman), menurut penuturannya, bahwa dalam

hun, Jamaluddin Dg. Nuntung mampu memperoleh penghasilan sar Rp. 1.500.000, yang berarti cukup untuk pembiayaan warga termasuk biaya untuk anak-anaknya yang masih kuliah.

Keadaan seperti ini, juga dapat dilihat pada Kulle yang juga bekerja sebagai petani garam dengan penghasilan bulannya kurang lebih Rp. 50.000. Ini berarti bahwa Kulle itu menghasilkan kurang lebih Rp. 750.000 setiap tahunnya. Lihat pendapatan seperti di atas, menunjukkan bahwa walaupun pendapatan tersebut belum mampu menutupi segala kebutuhannya, namun telah mampu menutupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dalam kelanjutan usaha dan kehidupan keluarganya.

Tingkat kehidupan petani garam di Kelurahan Benteng dapat dilihat pada salah seorang petani garam yakni Daeng Badu. Daeng Badu merupakan salah seorang pemilik alat penggaraman yang dapat dipersewakan atau diberikan pada orang lain untuk digarap dalam bentuk tesang. Sehingga dengan posisi seperti ini Daeng Badu merupakan petani garam yang cukup berhasil karena juga mempunyai pekerja yang membantu dalam pekerjaannya. Bahkan sarana pendukungnya juga cukup menunjang seperti kendaraan, tempat penampungan dan lain-lain. Keberhasilan Daeng Badu ini dapat dilihat dari kemampuannya menyekolahkan anak-anaknya baik pada tingkat menengah maupun pada sekolah tingkat tinggi.

Dengan demikian gambaran kehidupan petani garam di Benteng, walaupun masih sangat rendah, namun menurut penulis tidak lagi berada di bawah standar kemiskinan.

## Dampak Sosial Ekonomi

Perubahan-perubahan yang terjadi pada penggaraman lurahan Benteng khususnya pada periode 1960-1980-an ini melihat beberapa macam, antara lain :

Perubahan alat pendukung penggaraman

Perubahan sistem pemilikan tanah

Perubahan mutu hasil produksi garam

Perubahan pendapatan petani garam

Perubahan alat pendukung penggaraman

Perubahan alat sebagai pendukung penggaraman, khususnya pada tahun 1960-1980-an adalah bahwa sejak tahun 1960 alat-alat penggaramannya masih tradisional. Pada sekitar tahun 1980-an alat-alat pendukung tersebut mulai ada perubahan misalnya perubahan alat memasukkan air ke dalam petak-petak penggaraman sebelumnya menggunakan timba, pada tahun 1980-an ini banyak yang menggunakan pompa air yang menggunakan tenaga listrik.

Dengan perubahan alat tersebut, dengan sendirinya mempengaruhi para petani penggaraman utamanya mengenai tenaga ( penggunaan tenaga kerja). Hal mana bahwa dengan pemakaian pompa air yang menggunakan mesin, maka dengan sendirinya tenaga kerja yang dibutuhkan akan berkurang dibandingkan dengan memasukkannya dengan timba yang membutuhkan tenaga cukup banyak. Dengan demikian petani dapat mengolah lebih banyak lahan penggaraman.

nan sistim pemilikan tanah  
han sistim pemilikan tanah di Benteng khusus-  
an-tahun 1980-an adalah bahwa sejak tahun  
kan sejak adanya sistim penggarapan di  
ikan tanah kebanyakan dalam bentuk Tesang.  
hun 1980-an ini sesuai dengan hasil observasi  
yakan dilakukannya dalam bentuk sewa menyewa.  
i dijelaskan di muka, bahwa perubahan sistim  
h tersebut sebagai akibat dari perkembangan  
akat serta para pekerja/penggarap tidak  
banyak berhubungan dengan para pemilik tanah  
rsebut. Sehingga dengan demikian sistim  
a dalam bentuk sewa menyewa ini pada dasar-  
akibat dari perkembangan masyarakat itu  
dapat mengandung kemandirian individual.  
hwa perubahan sistim pemilikan tanah ini  
terlihat bahwa ada pengurangan/berkurang-  
gotong royong pada masyarakat. Ini bertolak  
pada sistim hubungan kerja dalam bentuk  
a tersebut masih sangat erat dan bahwa  
keputusan-keputusan yang diambil pada saat  
sebut selalu didasari oleh rasa kekeluargaan.  
mutu hasil produksi garam  
arah perbaikan mutu garam ini di mulai  
, yakni sejak dikeluarkannya keputusan  
ing mutu garam dan tata cara penyaluran

produksi garam rakyat. Sehingga dengan adanya  
aturan tersebut maka selanjutnya pada masyarakat  
juga diterapkan pada pengelolaan garam dalam  
yang lebih baik ( mutu ditingkatkan) termasuk  
hal ini menyangkut penggunaan garam beryodium.  
Selanjutnya perbaikan mutu garam tersebut lebih ditingkat-  
kan sejak dikeluarkannya peraturan bersama antara beberapa  
lembaga termasuk Menteri perdagangan, perindustrian dan  
koperasi. Karena dengan adanya penegasan dalam  
keputusan pemerintah tersebut para petani garam  
dituntut untuk mengolah penggarannya dengan cara  
lebih baik utamanya menyangkut mutunya. Untuk men-  
gatasi hal ini, oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah  
diberikan penyuluhan kepada para petani dengan baik.

Usaha kearah perbaikan mutu garam di Benteng,  
Sulawesi Utara dengan adanya perubahan waktu pengolahan garam  
yang biasanya lebih lama dari yang biasanya. Seperti  
diketahui bahwa untuk memperoleh garam yang mempunyai mutu  
lebih baik, maka lamanya penjemuran tersebut kurang  
dari satu minggu. Ini berarti lebih lama dari yang  
biasanya dengan hanya menggunakan waktu sekitar tiga hari.  
Perubahan pendapatan masyarakat (petani garam).

Perubahan alat, perbaikan mutu merupakan suatu  
langkah kearah perbaikan pendapatan petani garam itu  
sangat penting. Perubahan tingkat pendapatan ini dimungkinkan  
dengan penggunaan alat serta perbaikan mutu terse-

arti penggunaan tenaga kerja dan hasil garamnya lebih banyak dan harga yang lebih baik. Khusus untuk an alat pompa air berarti para petani lebih mampu h tanah-tanah penggaraman yang lebih banyak.

Sebagai kelanjutan dari perubahan pendapatan petani li Benteng tersebut, adalah perubahan tarap hidup garam tersebut serta peningkatan pendidikan ang- eluarga petani garam. Hal ini dapat dilihat pada pa anggota keluarga petani garam yang sudah mampu olahkan anak-anaknya sampai pada tingkat perguruan . Sebaliknya dengan mampunya para petani menyekolah- aknya pada tingkat yang lebih tinggi berarti juga t pendapatan dan kehidupannya sudah semakin baik.

## BAB. V

### K E S I M P U L A N

Penggaraman di Benteng telah mengalami dua fase sejak hadirnya sebagai suatu aktivitas masyarakatnya. Kedua fase tersebut yakni fase awal dengan sistim tradisional dan fase ke dua yakni fase pengembangan dengan sistim pra modern.

Fase awal dengan sistim pengolahan penggaraman tradisional berawal dari pengenalan penggaraman itu sebagai suatu mata pencaharian yakni sejak jaman pemerintahan Belanda atau pada kurun waktu tahun 1930-an sampai pada tahun 1970-an. pengolahan lahan penggaraman dengan sistim tradisional ini terlihat dari alat-alat pendukung penggaraman tersebut, termasuk cara kerja atau proses kerja penggaraman tersebut. Hal mana bahwa pada fase awal ini alat-alat yang dipergunakan sebagai pendukung penggaraman oleh masyarakat Benteng adalah merupakan hasil buah tangan sendiri. Dengan demikian alat-alat tersebut dengan sendirinya akan sesuai dengan kondisi masyarakat pembuatnya. Misalnya pada saat pemerintahan Belanda (Penjajah), maka kemampuan masyarakat Benteng, termasuk tingkat pendidikan dan sarana penunjang alat itu sendiri sangat kurang.

Hal lain, bahwa pada tahap awal (tradisional)

ini kondisi masyarakat dalam hal ini keadaan politik juga sangat mempengaruhi dan menentukan hasil kerja para petani garam seperti kurangnya kebebasan para petani untuk mengolah dan menikmati hasil pertaniannya. Apalagi dengan munculnya beberapa macam atau bentuk sistem politik dari berbagai penjajah, sehingga oleh masyarakat tidak ada ketetapan sistem dalam pengolahan lahan penggaramannya.

Segi lain sebagai ciri khas penggaraman tradisional di Benteng ( Kelurahan Benteng), adalah menyangkut kondisi alam, yang dalam hal ini utamanya sarana dan prasarana yang mendukung langsung penggaraman tersebut seperti jalan raya termasuk sarana angkutannya.

Ciri lain dari sistem penggaraman tradisional di Benteng juga dapat dilihat pada sistim penyalurannya atau sistim pemasarannya. Hal mana bahwa pada fase tradisional ini pemasarannya kebanyakan dilakukan dengan kerja sama dengan para pedagang kecil (pengumpul) yang sebetulnya kurang menguntungkan utamanya menyangkut ketentuan harga dan kestabilan harga hasil garam petani itu sendiri. Dengan kondisi seperti ini maka posisi para petani garam kurang menguntungkan, dalam arti hasil para pedagang akan lebih baik dibandingkan dengan para petani itu sendiri. Sehingga adalah suatu kenyataan pada masyarakat Benteng, bahwa pada sistem penggaraman tradisional ini kehidupan para pedagang lebih baik dibandingkan dengan para petani garam.

Terlepas dari rendahnya pendapatan para petani garam di Benteng sejak fase tradisional ini, namun ada beberapa hal yang menunjukkan dan membawa ciri masyarakat pendukung penggaraman tersebut sebagai masyarakat desa yang bersahaja, tapi mengutamakan kerja sama dan saling tolong menolong. Kenyataan seperti ini dapat dilihat pada sistim hubungan kerja seperti tesang dengan bagi hasilnya.

Keadaan seperti di atas seiring dengan perubahan sistem dan alat pendukungnya, sehingga pada fase ke dua atau yang penulis istilahkan fase pra modernisasi hampir semua hal-hal tersebut (tradisional) mengalami perubahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis melihat beberapa perubahan pada fase pra modern penggaraman di Benteng sebagai berikut :

- Perubahan atau berkurangnya pemakaian tenaga kerja dengan pemakaian mesin pompa air.
- Perubahan sistim pengolahan dengan adanya peningkatan mutu garam yang diharapkan.
- Perubahan sistim hubungan kerja dari tesang kearah bentuk yang lain yakni sewa menyewa walaupun tidak semua.
- Perubahan tingkat pendapatan yang sekaligus perubahan tarap hidup para petani garam.
- Perubahan yang disebutkan terakhir di atas sebagai akibat dari sistem pengolahan, sistim hubungan kerja serta pemasaran yaitu berfungsinya KUD dan PN.Garam.

Walaupun demikian dari perubahan-perubahan tersebut di atas penulis menggaris bawahi, bahwa sejak perubahan sistem penggaraman tradisional ke pra modern terjadi perubahan sistim nilai dalam masyarakat benteng, yakni kegotong royongan dengan dasar saling tolong menolong.

Akan tetapi perlu diakui, bahwa dengan sistem pra-modern tersebut membawa masyarakat utamanya para petani garam pada peningkatan taraf hidup yang lebih baik, walaupun masih tetap perlu dikembangkan. Hal ini dapat terlihat pada perubahan-perubahan pemenuhan kebutuhan hidup para petani garam, termasuk biaya untuk anak-anak para petani garam yang sudah banyak menginjak bangku kuliah.

Sehubungan dengan cara dan kehidupan petani garam di Kelurahan Benteng, maka penulis melihat bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut benturan-benturan yang terjadi dan akibat-akibatnya bagi petani garam itu sendiri. Benturan-benturan tersebut adalah termasuk pada sistem pengolahan (penggaraman) antara sistem tradisional dan sistem pra-modern dalam perspektif sejarah agar dapat diketahui dengan jelas keuntungan-keuntungan dari setiap sistem tersebut. Pelaksanaan ini sebaiknya dilakukan dalam bentuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdullah, Taufik dan Abdurrahman Surjomihardjo, 1985. Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif. Jakarta : PT.Gramedia.
- Gotschalk, Louis. 1983. Mengerti Sejarah. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press).
- Kadir, Harun dkk. 1985. Sejarah Daerah Sulawesi Selatan. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Kartodirdjo, Sartono. 1976. Sejarah Pedesaan dan Pertanian Prisma nomor khusus.
- \_\_\_\_\_, Struktur Kekuasaan, Sistem Fiskal dan Perkembangan Pedesaan. T.Penerbit dan tahun terbit.
- \_\_\_\_\_, 1983. Elite Dalam Perspektif Sejarah. Jakarta: (LP3ES) Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial.
- Lembaran Berita Sejarah Lisan. 1985. Arsip Nasional Republik Indonesia. No.11 ISSN 0216-4509.
- \_\_\_\_\_, 1989. Arsip Nasional Republik Indonesia, No.12 ISSN 0216-4509.
- Mudiyono. 1978. Tesang Studi Tentang Struktur Hubungan Kerja Petani di Lakatong. Ujung Pandang : Laporan Penelitian Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.
- Mattulada. 1982. Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah. Ujung Pandang : Bhakti Baru.
- Faeni, Mukhlis. 1988. Dimensi Sosial Kawasan Pantai. Ujung Pandang : P3MP Diterbitkan untuk The Toyota Foundation.
- \_\_\_\_\_, 1986. Dinamika Bagis Makassar. Ujung Pandang : FLPIIS.
- Paeni, Mukhlis dan Katelyn Robinson (ed). 1985. Panorama Sosial. Ujung Pandang : LEPHAS.
- Patunruk, Abd.Razak Dg. 1963. Sejarah Gowa. Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.

- Soekanto, Soerjono. 1983. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : CV. Rajawali.
- Surjadi. 1983. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung : Alumni.
- Siagian, H. 1989. Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung : FT. Citra Aditya Bakti.
- Wiriaatmadja, Soekandar. 1989. Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan. Jakarta : CV. Yasaguna.